



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



# MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN IV DOMAIN LAYANAN



# TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



# DIDUKUNG OLEH



01.

## **GAMBARAN UMUM**

Prinsip Penilaian Domain  
[Layanan]

02.

## **ANALISIS KESENJANGAN**

Perolehan Indeks SPBE  
Tahun 2022

03.

## **ELABORASI PEMAHAMAN**

Pemenuhan Kriteria Level  
Indikator (General → Spesifik)

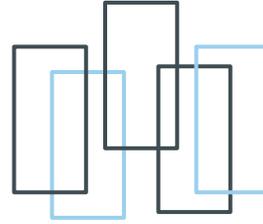
04.

## **TINDAK LANJUT**

*Do and Don't* Evaluasi  
Mandiri dan Persiapan Bukti  
Dukung



# GAMBARAN UMUM



## Domain Layanan Memiliki **Bobot 45,5%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan penerapan/penggunaan terhadap layanan/aplikasi sejenis, baik yang dikembangkan oleh IPPD atau menggunakan Aplikasi Umum/Pusat/Instansi lain (psl 34-45)
- Penilaian dilakukan dengan mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis (kemampuan/fitur teknis) yang dimiliki layanan/aplikasi tersebut berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah ditetapkan, yaitu: **Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi** dan **Optimum**.
- Data Pendukung berupa:
  - Screenshot layanan elektronik sesuai tingkat kematangan dan penjelasan
  - Buku manual/video tutorial pengoperasian aplikasi (sesuai tingkat kematangan yang di klaim,
  - SOP aplikasi/ arsitektur aplikasi/dokumentasi yang dapat menunjukkan kemampuan/fitur teknis yang dimaksud/penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola dan penerapan manajemen dari layanan (helpdesk)
  - Dokumentasi hasil reviu berupa notulensi (tidak terbatas pada info peserta, agenda pembahasan, catatan penting, rencana tindaklanjut), dan surat undangan (optional)
- Dalam menarasikan sesuai dengan **skeleton** yang ada di **Pedoman Menteri PANRB**.

# Filosofi Dasar Tingkat Kematangan **Domain Layanan**

1

Domain  
Kebijakan



*“Mandatnya”-nya  
sudah benar?*



2

Domain  
Tata Kelola



*Eksekusinya sudah benar?  
(terencana, terpedomani dan direviu  
berkala)*



3

Domain  
Manajemen

4

Domain  
Layanan



*“Pemanfaatan”  
sistem elektroniknya sudah  
maksimal?*



- 32 LAYANAN PERENCANAAN
- 33 LAYANAN PENGANGGARAN
- 34 LAYANAN KEUANGAN
- 35 LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
- 36 LAYANAN KEPEGAWAIAN
- 37 LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS
- 38 LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
- 39 LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

*Penerapan di level 5 bisa dicapai dengan syarat tidak hanya hal teknis, dan bisa dicapai dengan penerapan RB Tematik*

*Penerapan di level 5 bisa dicapai dengan syarat khusus*

- 40 LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
- 41 LAYANAN KINERJA PEGAWAI
- 42 LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
- 43 LAYANAN DATA TERBUKA
- 44 LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
- 45 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1**
- 46 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 2**
- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 3**

# ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN LAYANAN

Instansi Pusat  
2021: 3,15  
2022: 3,36



Pemerintah Daerah  
2021: 2,74  
2022: 2,88

Capaian Nasional  
Pada Rerata Indeks  
Domain Layanan SPBE

2021  
2,81

2022  
2,96



01

Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

02

Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Layanan

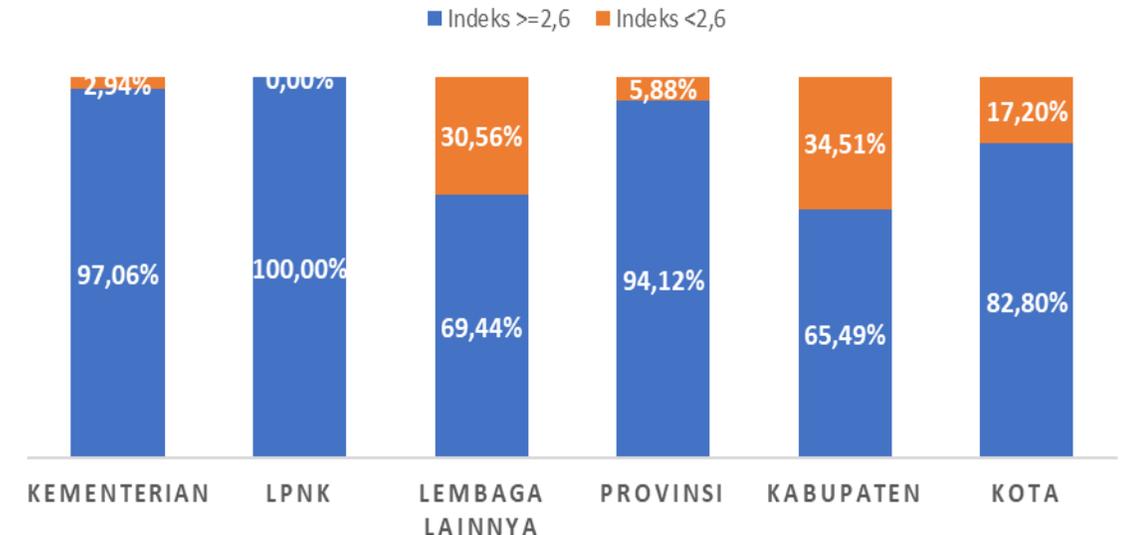
03

Lebih dari 80% pada Kementerian, LPNK, Pemprov dan Pemkot telah mencapai nilai Baik

04

Kelompok Lembaga Lainnya dan Pemkab masih dibawah 70% yang telah mencapai predikat Baik

PERSENTASE DOMAIN LAYANAN SPBE



Legend :

- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

# Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan [Teknis]

Level	Kapabilitas	Keterangan
1	Informatif	<b>Penjelasan:</b> Layanan SPBE diberikan dalam bentuk <b>informasi satu arah</b> .
		<b>Ciri-ciri Umum:</b> website satu arah, halaman statis, hanya menampilkan informasi-informasi.
		<b>Keyword:</b> halaman statis, web-portal, landingpage
2	Interaktif	<b>Penjelasan:</b> Layanan SPBE diberikan dalam bentuk <b>interaksi dua arah</b> .
		<b>Ciri-ciri Umum:</b> tersedianya fitur interaksi 2 arah: komentar, live chat, fitur pencarian, form pengisian
		<b>Keyword:</b> komentar, live chat, pencarian, formulir, unduh, upload, buku tamu
3	Transaksi	<b>Penjelasan:</b> Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan <b>transaksi</b> operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
		<b>Ciri-ciri umum:</b> adanya aliran data di dalam satu aplikasi, hal ini biasanya terwakili melalui fitur approval, validasi, tracking, analisis basis data
		<b>Keyword:</b> approve, setuju, reject, tolak, lacak, dashboard, tanda tangan digital.

# Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan [Teknis]

Level	Kapabilitas	Keterangan
4	Kolaboratif	<b>Penjelasan:</b> Layanan SPBE diberikan melalui <b>integrasi/kolaborasi</b> antar layanan SPBE
		<b>Ciri umum:</b> terdapat bentuk aliran data seperti pada tingkat 3, namun <b>berlaku antar aplikasi</b> . Adanya service/data yang diambil dari layanan SPBE yang berbeda.
		<b>Keyword:</b> API, service, POST, GET, JSON
5	Optimal	<b>Penjelasan:</b> Layanan SPBE telah dilakukan <b>perbaikan dan peningkatan</b> kualitas menyesuaikan <b>perubahan kebutuhan</b> di lingkungan internal dan eksternal
		<b>Ciri-ciri Umum:</b> terdapat aplikasi yang telah diperbarui (versi terbaru), dengan syarat aplikasi sebelumnya telah memenuhi tingkat 4, optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan
		<b>Keyword:</b> update, upgrade, versioning, patch, SE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan aplikasi

# PEMENUHAN KRITERIA UMUM DOMAIN LAYANAN (SEDERHANA)

1. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

user                      layanan



Memberikan **informasi 1 arah**

2. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.



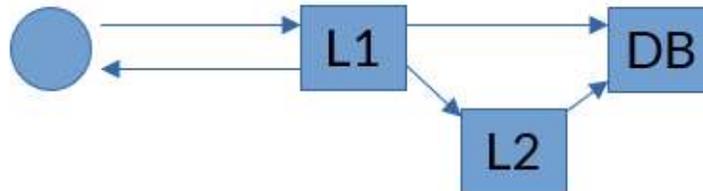
**Pecarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen**

3. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.



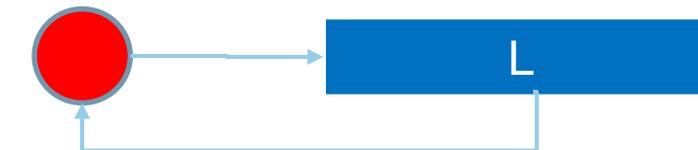
Layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti **transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data**

4. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/ kolaborasi dengan layanan SPBE lain.



Layanan **kolaborasi dengan layanan elektronik lain (integrasi basis data/ middleware/layanan)**

5. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas serta optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)



**Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti**



  
**SRIKANDI**  
Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah

Login

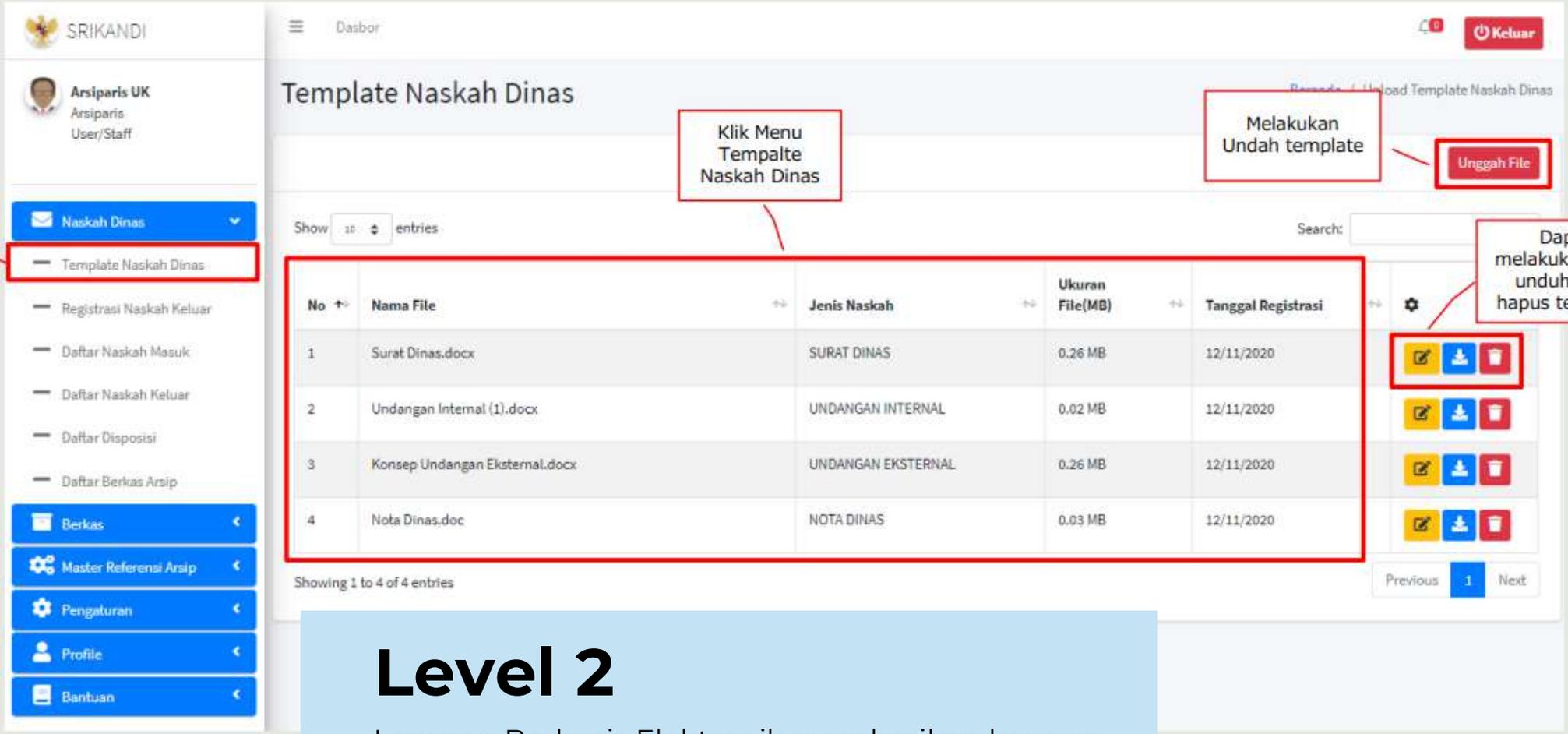
   

Copyright © Pemerintah Indonesia 

## Level 1

Layanan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan **informasi** terkait kegiatan pemerintah.

**Kriteria:** Informatif (satu arah)



Klik Menu Tempalte Naskah Dinas

Klik Menu Tempalte Naskah Dinas

Melakukan Undah template

Unggah File

Dapat melakukan edit, unduh, dan hapus template

# Level 2

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan **interaksi** terkait urusan pemerintahan

**Fitur:** pencarian informasi, pengunggahan dokumen, dan pengunduhan dokumen.

**Kriteria:** Interaktif (dua arah)

### Konsep Naskah Keluar

Home / Konsep Naskah Keluar

Buat Konsep Naskah

Folder: Naskah Keluar, Konsep

Show 16 entries Search:

No	Tanggal Registrasi	Nomor Naskah	Pengirim	Tujuan	Hal	Posisi	Aksi
1	04/12/2020	DI.01.02/054/2020	Drs. M. Imam Mulyantono, MAP Kepala Pusat Data dan Informasi	1. Dr. Andi Kasman, SE, MM, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	undangan internal	MAP, Kepala Pusat Data dan Informasi	Proses Verifikasi
			Drs. M. Imam Mulyantono, MAP Kepala Pusat Data dan Informasi	1. Drs. Amieka Hasraf, MM, Direktur Kearsipan Daerah II 2. Dr. Muhammad Sumitro, SH, MAP, Direktur Kearsipan Daerah I 3. Sarip Hidayat, Kepala Biro Umum 4. Drs. Bambang Surono, M Hum	Ujicoba Nota Dinas Solihin	1. Drs. M. Imam Mulyantono, MAP, Kepala Pusat Data dan Informasi	Proses Verifikasi

# Level 3

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan **transaksi** kepada pengguna

**Fitur:** transaksi basis data, validasi data, mekanisme **persetujuan**, dan **analitik data**.

**Kriteria:** Transaksi

### Konsep Naskah Keluar

Home / Detail Naskah

Nomor Naskah : DI.01.02/054/2020

Pengirim: Drs. M. Imam Mulyantono, MAP, Kepala Pusat Data dan Informasi PUSAT DATA DAN INFORMASI

Nomor Agenda : -  
Jenis Naskah: UNDANGAN INTERNAL  
Tanggal Naskah: Jumat, 04/12/2020  
Tanggal Registrasi: Jumat, 04/12/2020  
Urgensi: BIASA  
Sifat: BIASA  
No Berkas: 0  
No Referensi: -  
Unit Persuratan: Kepala Pusat Data dan Informasi

Status Periksa: Belum Diperiksa

Tujuan : 1. Dr. Andi Kasman, SE, MM, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

Tembusan : -

Hal undangan internal IPSK  
Isi Ringkas : undangan internal IPSK

File Naskah :

No	Nama Naskah	Dibuat Oleh	Tanggal	Ukuran File	Aksi
1	DRAFT-Undangan Internal (1).docx	Sekretaris.pusdatin	Jumat, 04/12/2020 00:00:00	0.02 MB	

### Dashboard

Home Lembaga Kebijakan Peng... 2020 - Semua Satker

1 SATKER BELANJA PENGADAAN Rp 132,7 M

PERENCANAAN Rp 95,2 M 827 paket	PERSIAPAN Rp 37,6 M 43 paket	PENILIHAN Rp 135,8 M Hasil Rp 26,5 M / 49 paket	KONTRAK Rp 15,4 M 12 paket	SERAH TERIMA Rp 5,3 M 7 paket	PENYAYAPAN Rp. 0,00
---------------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Proses Pengadaan: Proses Paket

Daftar Belanja Pengadaan Satker/OPD: Proses Paket

Mulai dari: October 2019 Sampai dengan: December Akumulatif

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Satker	Belanja Pengadaan	Pagu BLP
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	133M	99M

Showing 1 to 1 of 1 entries

# Level 4

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, layanan sejenis IPPD lain, dan/atau layanan berbeda SPBE IPPD lain.

**Kriteria:** Kolaboratif

Body Cookies (2) Headers (10) Test Results

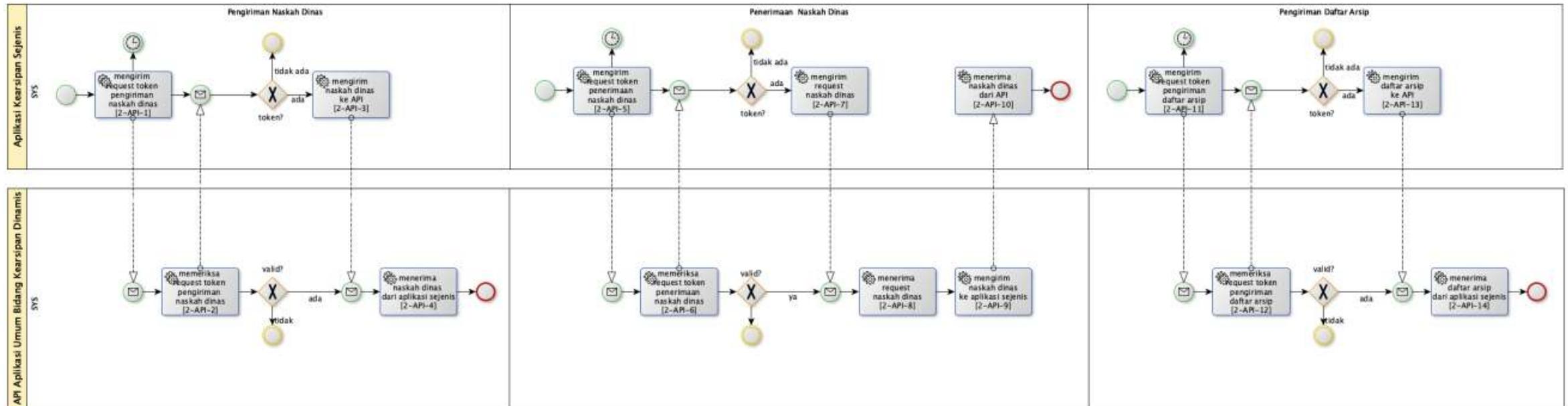
Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "id_user": "1776",
3   "nama_user": "Tim Evaluasi SPBE",
4   "username": "timevalspbpe",
5   "id_role": "5",
6   "institution_id": null,
7   "code": null,
8   "nama_instansi": null
9 }
```

API

[2021-06-14 01:00:44]	production INFO: update 196	1003	I
[2021-06-14 01:00:44]	production INFO: update 196	1003	W
[2021-06-14 01:00:44]	production INFO: update 197	2003	R
[2021-06-14 01:00:44]	production INFO: update 197	2004	H
[2021-06-14 01:00:44]	production INFO: update 196	2003	E
[2021-06-14 01:00:44]	production INFO: update 198	1005	B
[2021-06-14 01:00:45]	production INFO: update 198	1008	T
[2021-06-14 01:00:45]	production INFO: update 199	2001	J
[2021-06-14 01:00:45]	production INFO: update 199	1012	R
[2021-06-14 01:00:47]	production INFO: update 196	1008	S
[2021-06-14 01:00:47]	production INFO: update 196	1006	S
[2021-06-14 01:00:47]	production INFO: update 197	2003	U
[2021-06-14 01:00:47]	production INFO: update 197	1012	D
[2021-06-14 01:00:48]	production INFO: update 197	2002	I
[2021-06-14 01:00:48]	production INFO: update 198	2004	N
[2021-06-14 01:00:50]	production INFO: update 197	2004	T
[2021-06-14 01:00:50]	production INFO: update 197	1002	T
[2021-06-14 01:00:50]	production INFO: update 199	2020	A
[2021-06-14 01:00:50]	production INFO: update 197	2002	S
[2021-06-14 01:00:51]	production INFO: update 196	2002	N
[2021-06-14 01:00:52]	production INFO: update 197	2002	D
[2021-06-14 01:00:52]	production INFO: update 197	2001	K
[2021-06-14 01:00:53]	production INFO: update 197	2004	S
[2021-06-14 01:00:53]	production INFO: update 198	2014	E
[2021-06-14 01:00:53]	production INFO: update 199	1001	A
[2021-06-14 01:00:55]	production INFO: update 197	2005	Y
[2021-06-14 01:00:55]	production INFO: update 196	1002	S
[2021-06-14 01:00:56]	production INFO: update 197	1002	P
[2021-06-14 01:00:57]	production INFO: update 198	2009	R
[2021-06-14 01:00:58]	production INFO: update 196	1005	S
[2021-06-14 01:00:58]	production INFO: update 198	2018	T
[2021-06-14 01:00:59]	production INFO: update 197	1014	A
[2021-06-14 01:00:59]	production INFO: update 199	1008	T
[2021-06-14 01:01:00]			
[2021-06-14 01:01:02]	pro		

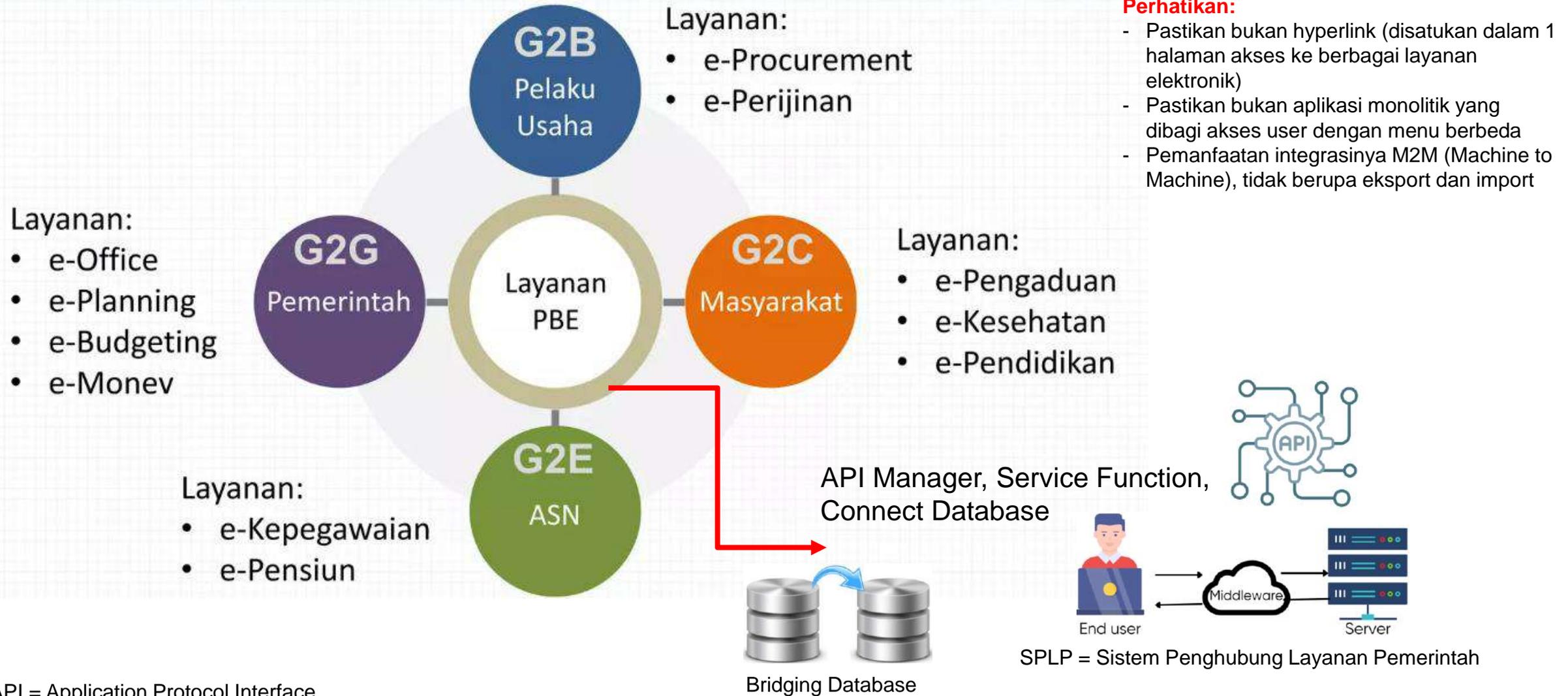
LOG INTEGRASI



Gambar 11. API Integrasi Aplikasi Kearsipan Sejenis

# Kolaborasi / Integrasi

## (Integrasi Layanan, Middleware, Basis Data)



### Perhatikan:

- Pastikan bukan hyperlink (disatukan dalam 1 halaman akses ke berbagai layanan elektronik)
- Pastikan bukan aplikasi monolitik yang dibagi akses user dengan menu berbeda
- Pemanfaatan integrasinya M2M (Machine to Machine), tidak berupa ekspor dan import

Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual

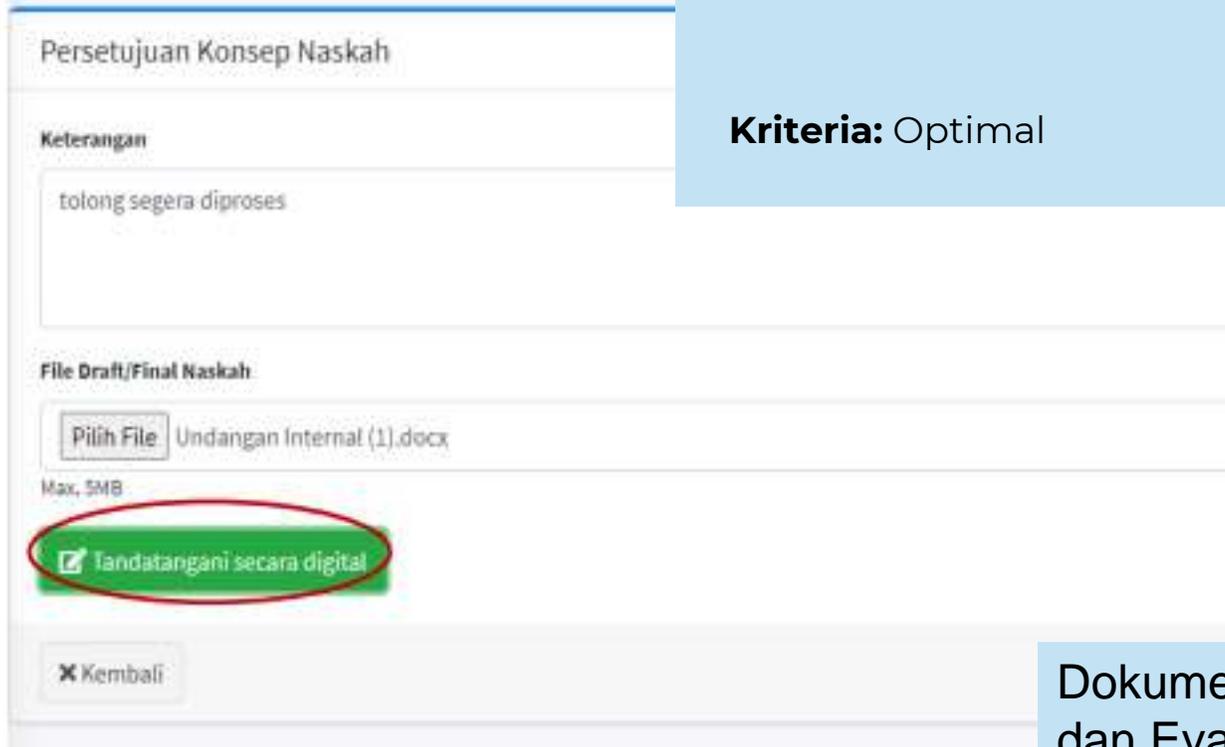
## Tampilan Fitur Setelah Update

# Level 5

Layanan Berbasis Elektronik telah dilakukan **perbaikan** berdasarkan **hasil reviu dan evaluasi** terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

**Kriteria:** Optimal

## Tampilan Fitur Setelah Update



## KOP SURAT



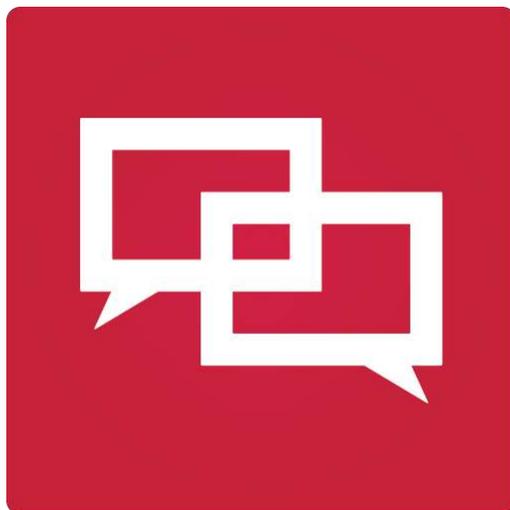
Dokumen Resmi Reviu dan Evaluasi Aplikasi

Tempat dan Tanggal

TTD  
Pejabat

# Daftar Aplikasi Umum yang telah ditetapkan

## LAPOR-SP4N KepmenPANRB No.680/2020



Aplikasi Umum Bidang  
Pengaduan Pelayanan  
Publik

## SRIKANDI KepmenPANRB No.679/2020



**SRIKANDI**  
Sistem infoRmasi KeArsipaN Dinamis terintegrasi

Aplikasi Umum  
Bidang Kearsipan  
Dinamis

## SPSE KepmenPANRB No.1148/2021



Aplikasi Umum  
Bidang  
Pengadaan  
Barang dan Jasa  
Pemerintah

Sesuai dengan  
Pasal 36 ayat 1,  
Perpres 95,2018



# \*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

\*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N – LAPOR	Aplikasi Umum	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD
Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI		
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE		
Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan	SIPD, <u>FMIS (SIMDA Next G)</u>	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	
Layanan Penganggaran, Keuangan, dan Pengadaan BMD	<u>SIMDA, SIMD@ BMD</u>		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	KRISNA		
Layanan Keuangan	SAKTI		

# \*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

\*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Kepegawaian	SAPK SIASN SIMPEGNAS	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD
Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI		
Layanan Pengelolaan BMN/BMD	SIMAK BMN/SIMDA BMD SIAP BMD SIMAN		
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	e-Audit Gol Online KPK E-Pengawasan		
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-Sakip Reviu e-MONEV		
Layanan Kinerja Pegawai	SIMPEGNAS		
Layanan Data Terbuka	Satu Data Indonesia		

# \*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

\*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Publik Sektoral	OSS SiCantik	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD

## Yang Harus Diperhatikan Terkait Pemanfaatan Aplikasi IPPD:

- ✓ Tangkapan layar yang membuktikan bahwa aplikasi umum dan berbagi pakai tersebut “benar-benar digunakan”
- ✓ Ditunjukkan dengan trafik data, user pengguna atau time stamp pada menu atau fitur yang ada pada layanan
- ✓ Perlu dipastikan tidak hanya sekedar pemanfaatan secara “ceremonial”.



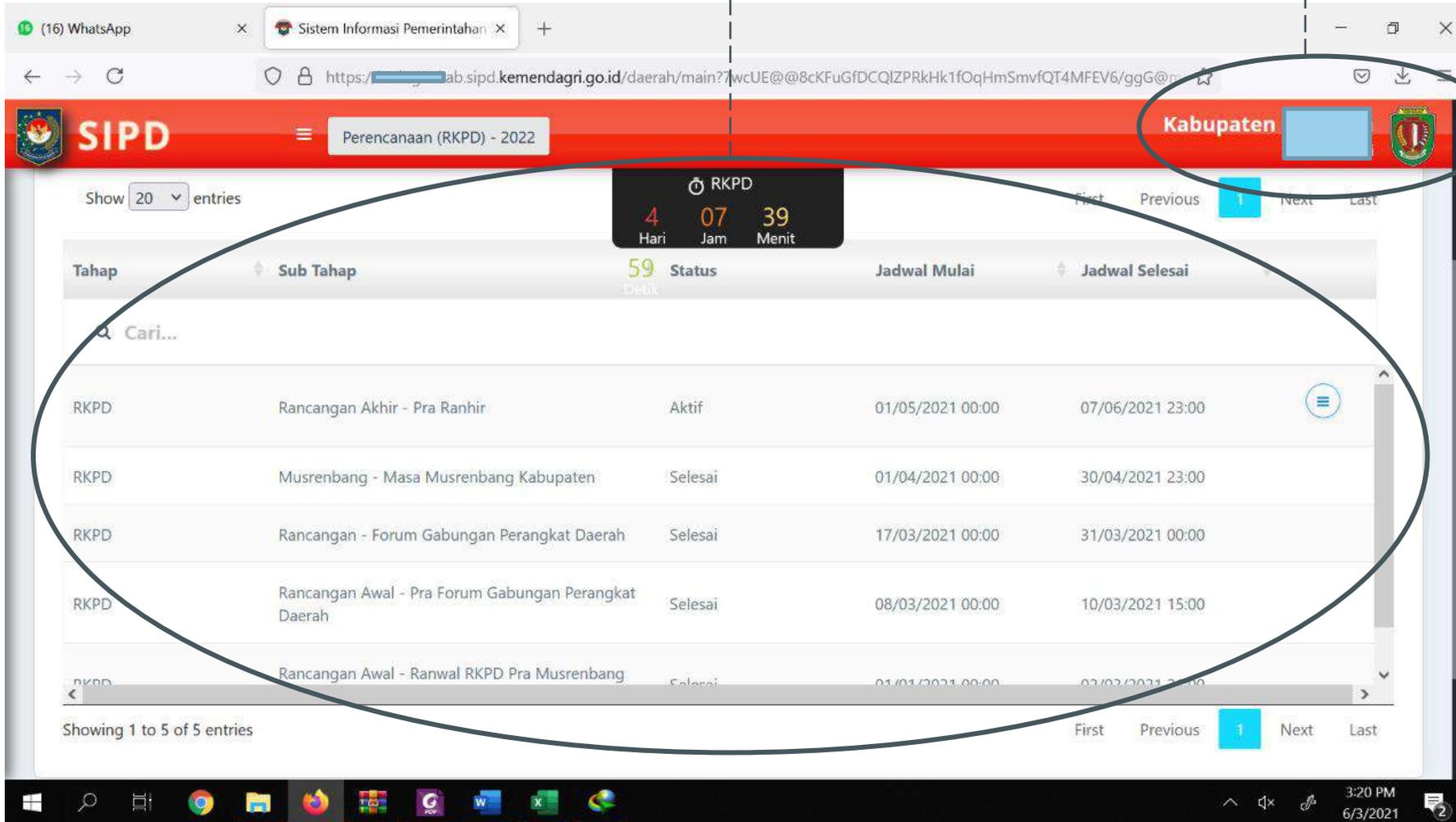
# Contoh Data Dukung Domain Layanan (Untuk Aplikasi Umum dan Aplikasi Berbagi Pakai)

Kode Tender	Nama Tender	Tahap	Dokumen
3491438	Belanja Pakaian Batik, Olah Raga, Seragam Nasional, dan Seragam Pramuka SMP/MTs	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
3490438	Belanja Pakaian Batik, Olah Raga, Seragam Nasional, dan Seragam Pramuka SD/MI	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
3489438	Belanja Barang Hibah yang diserahkan kepada pihak Masyarakat/Pihak Ketiga (Pakaian Batik, Olah Raga, Seragam Nasional, dan Seragam Pramuka SD/MI, SMP/MTs)	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
3487438	Pembangunan Gedung SDN Baun Bango	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
3183438	Pengadaan Jaringan Komputer (UNBK) di SMPN Kabupaten Katingan	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
3180438	Belanja jasa konsultasi pendampingan pengadaan aplikasi dana BOS	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
3158438	Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah SDN Baun Bango dan WC beserta sanitasinya	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
2700438	Pengadaan P.C Unit/ Komputer Dastop All One (Inovasi) untuk Sekolah Jerjang SD/SMP Kecamatan Katingan Hilir	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
1749438	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP Negeri se Kabupaten Katingan-Pakaian Batik SMP/MTs, Pakaian Olah Raga SMP/MTs, Seragam Nasional SMP/MTs, Seragam Pramuka SMP/MTs	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
1737438	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD dan SMP Swasta se Kabupaten Katingan-Pakaian Batik SD/SMP/MTs, Pakaian Olah Raga SD/SMP/MTs, Seragam Nasional SD/SMP/MTs, Seragam Pramuka SD/SMP/MTs	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak
1734438	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD Negeri se Kabupaten Katingan-Pakaian Batik SD/MI, Seragam Nasional SD/MI, Seragam	Tender Sudah Selesai	E-Kontrak

Contoh bukti dukung pemanfaatan **aplikasi LPSE (bagian dari SPSE)** sebagai **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Penyajian bukti dukung yang menunjukkan bahwa IPPD telah menggunakan **Aplikasi Umum** yang telah ditetapkan.

# Contoh Data Dukungan Domain Layanan (Untuk Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai)

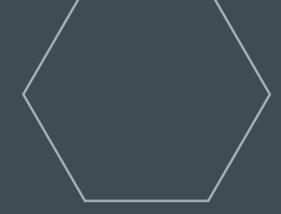
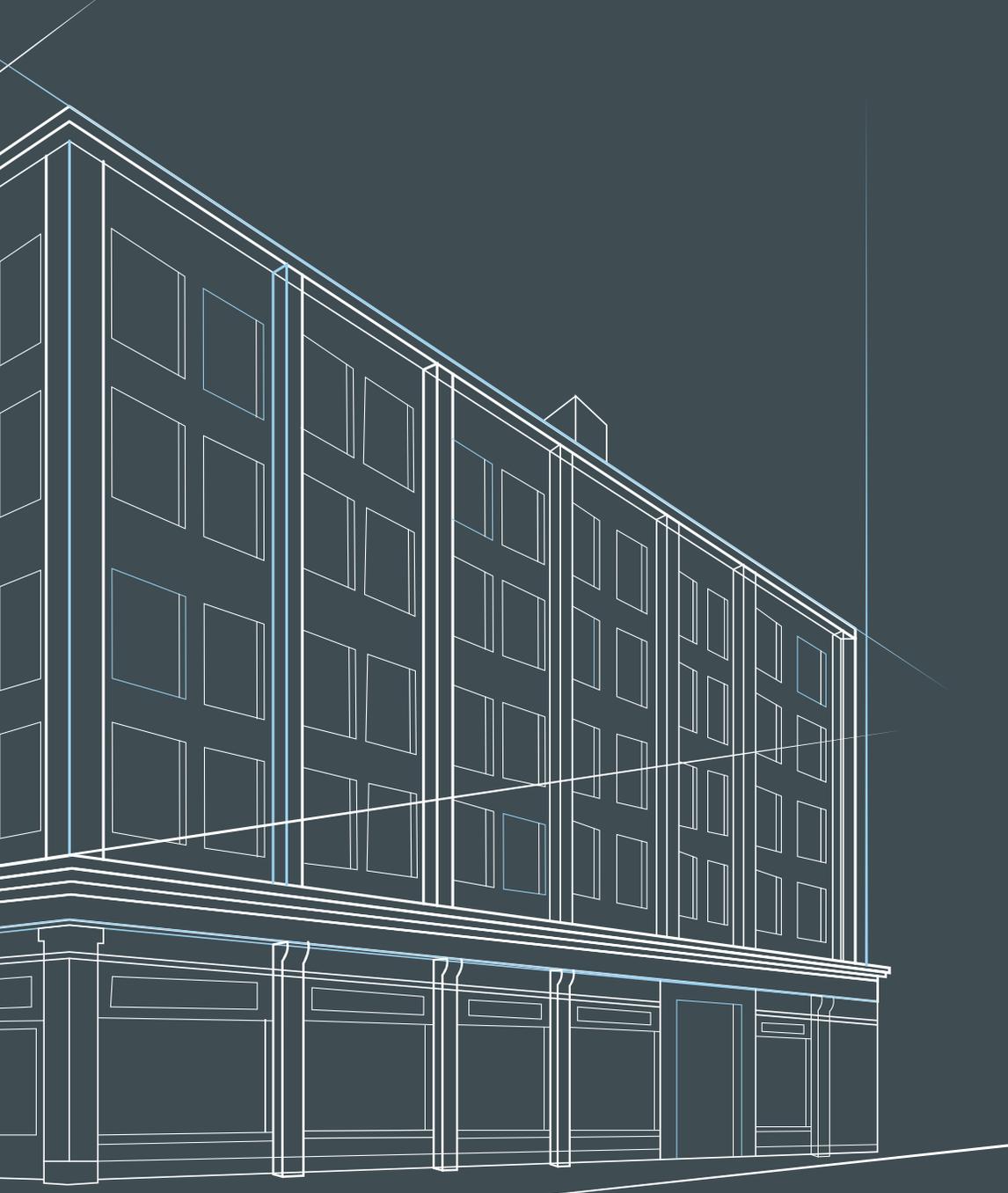


Screenshot of the SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) web application interface. The interface shows a header with the SIPD logo and a navigation menu. Below the header, there is a table displaying RKP (Rencana Kerja Pemerintah) data. The table has columns for Tahap, Sub Tahap, Status, Jadwal Mulai, and Jadwal Selesai. The data rows show various stages of planning, such as 'Rancangan Akhir - Pra Ranhir', 'Musrenbang - Masa Musrenbang Kabupaten', and 'Rancangan - Forum Gabungan Perangkat Daerah'. A large blue oval highlights the table content. A red box highlights the 'Kabupaten' dropdown menu in the header. A blue callout box on the right contains text about the application being used as a planning service. Another blue callout box at the bottom right contains text about the application being a shared application provided by the central government.

Tahap	Sub Tahap	Status	Jadwal Mulai	Jadwal Selesai
RKPD	Rancangan Akhir - Pra Ranhir	Aktif	01/05/2021 00:00	07/06/2021 23:00
RKPD	Musrenbang - Masa Musrenbang Kabupaten	Selesai	01/04/2021 00:00	30/04/2021 23:00
RKPD	Rancangan - Forum Gabungan Perangkat Daerah	Selesai	17/03/2021 00:00	31/03/2021 00:00
RKPD	Rancangan Awal - Pra Forum Gabungan Perangkat Daerah	Selesai	08/03/2021 00:00	10/03/2021 15:00
RKPD	Rancangan Awal - Ranwal RKPD Pra Musrenbang	Selesai	01/03/2021 00:00	03/03/2021 23:00

Contoh bukti dukungan pemanfaatan aplikasi SIPD sebagai Layanan Perencanaan

Penyajian bukti dukungan yang menunjukkan bahwa IPPD telah menggunakan Aplikasi berbagi pakai yang disediakan pemerintah pusat



32

# INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan



“Perencanaan adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan perencanaan** yang **efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan **keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi** yang **memberikan nilai manfaat** dalam pengelolaan perencanaan IPPD”

## TUJUAN/MANFAAT

- **Meningkatkan kualitas** penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Memberikan **nilai manfaat** dalam pengelolaan perencanaan IPPD
- Meningkatkan **optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas** melalui **keterpaduan** proses bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan perencanaan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b></u> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
----------------------	---

## • • • • • REFERENSI LAYANAN PERENCANAAN • • • • •

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



# INDIKATOR 32

## Layanan Perencanaan

(2/2)

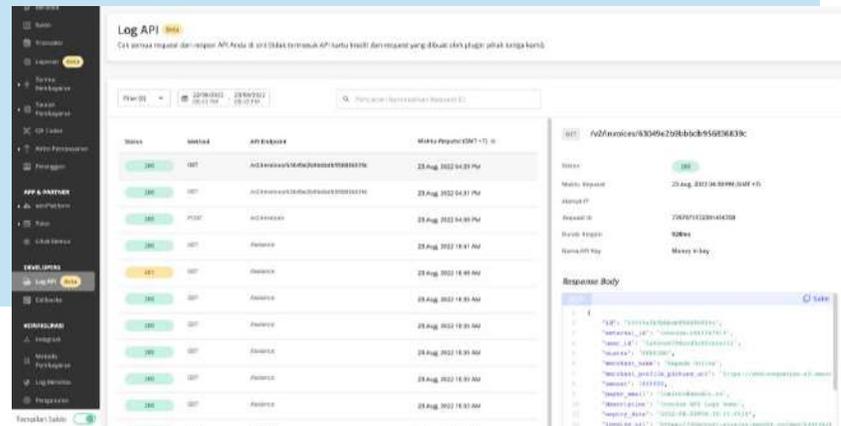


### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran, keuangan dan/atau dengan Layanan Perencanaan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya



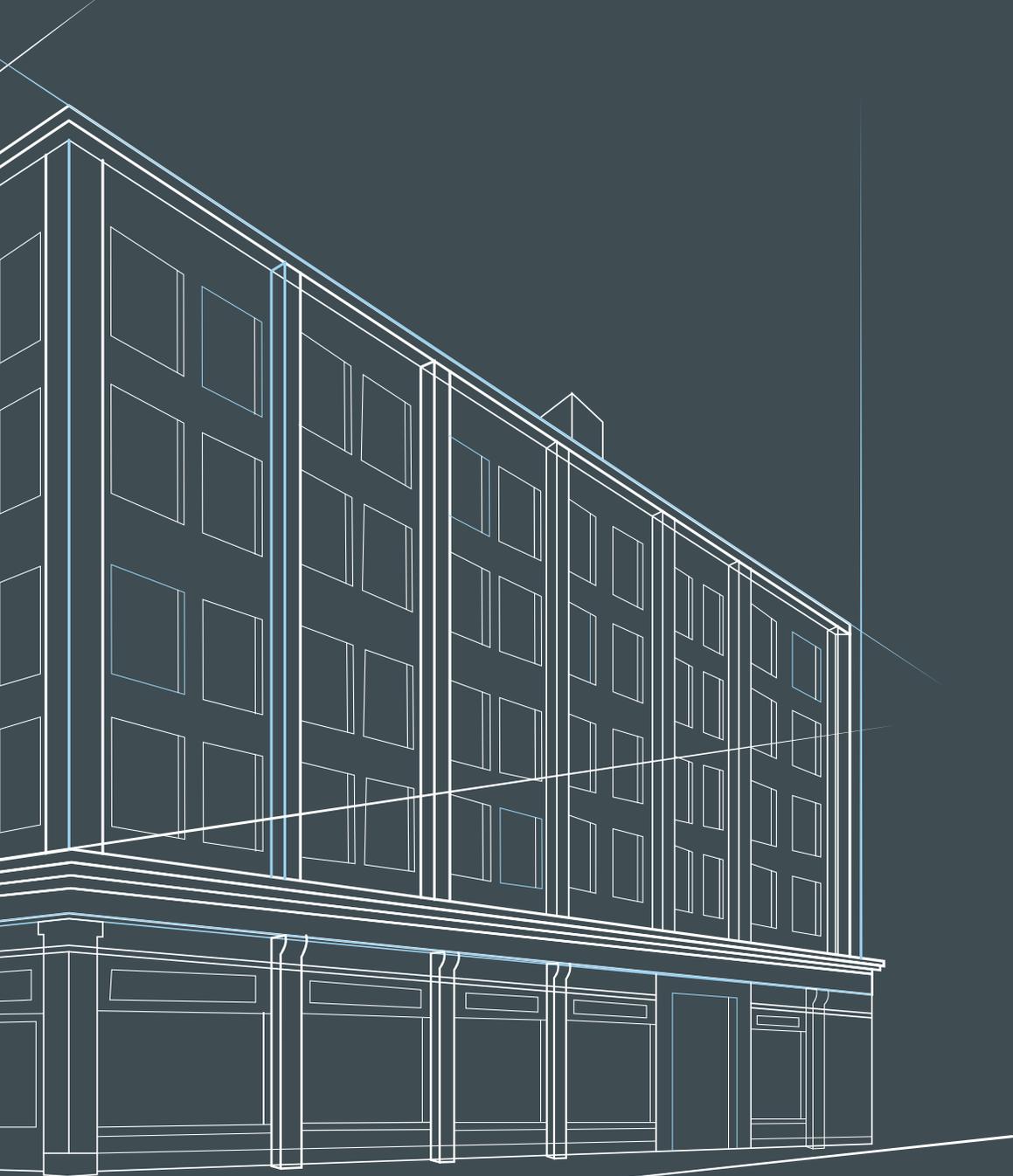
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- **Dokumentasi** tindak lanjut/**pengembangan** juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan hasil **revisi** dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





**33**

# INDIKATOR 33

Layanan Penganggaran



# LAYANAN PENGANGGARAN

“Penganggaran adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan **nilai manfaat** dalam Pengelolaan **Penganggaran** Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah.
- **Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas** melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</b></u><ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- Bukti optimalisasi</li></ul></li></ul>
----------------------	---

## • • • • • REFERENSI LAYANAN PENGANGGARAN • • • • •

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 33

## Layanan Penganggaran

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan jumlah penganggaran kegiatan yang tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** penganggaran kegiatan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait penganggaran kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

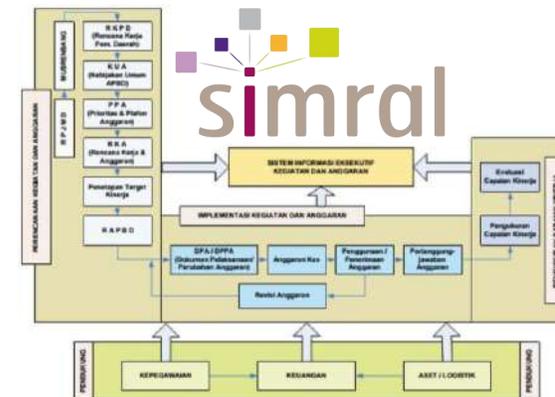
- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan atau Download**

### Level 3

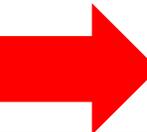
IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi penganggaran kegiatan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan **mekanisme persetujuan dan validasi** penganggaran kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 33

## Layanan Penganggaran

(2/2)

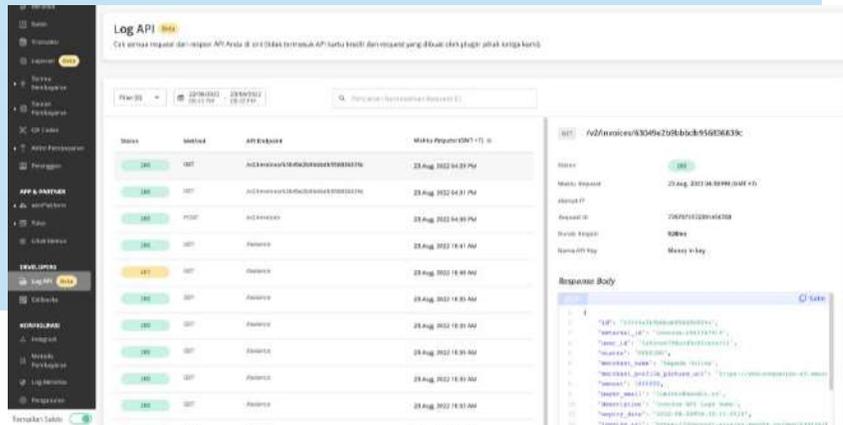


### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti penganggaran, keuangan dan/atau dengan Layanan penganggaran IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya



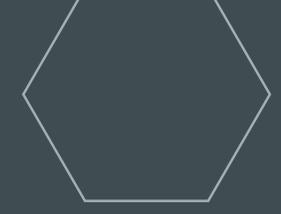
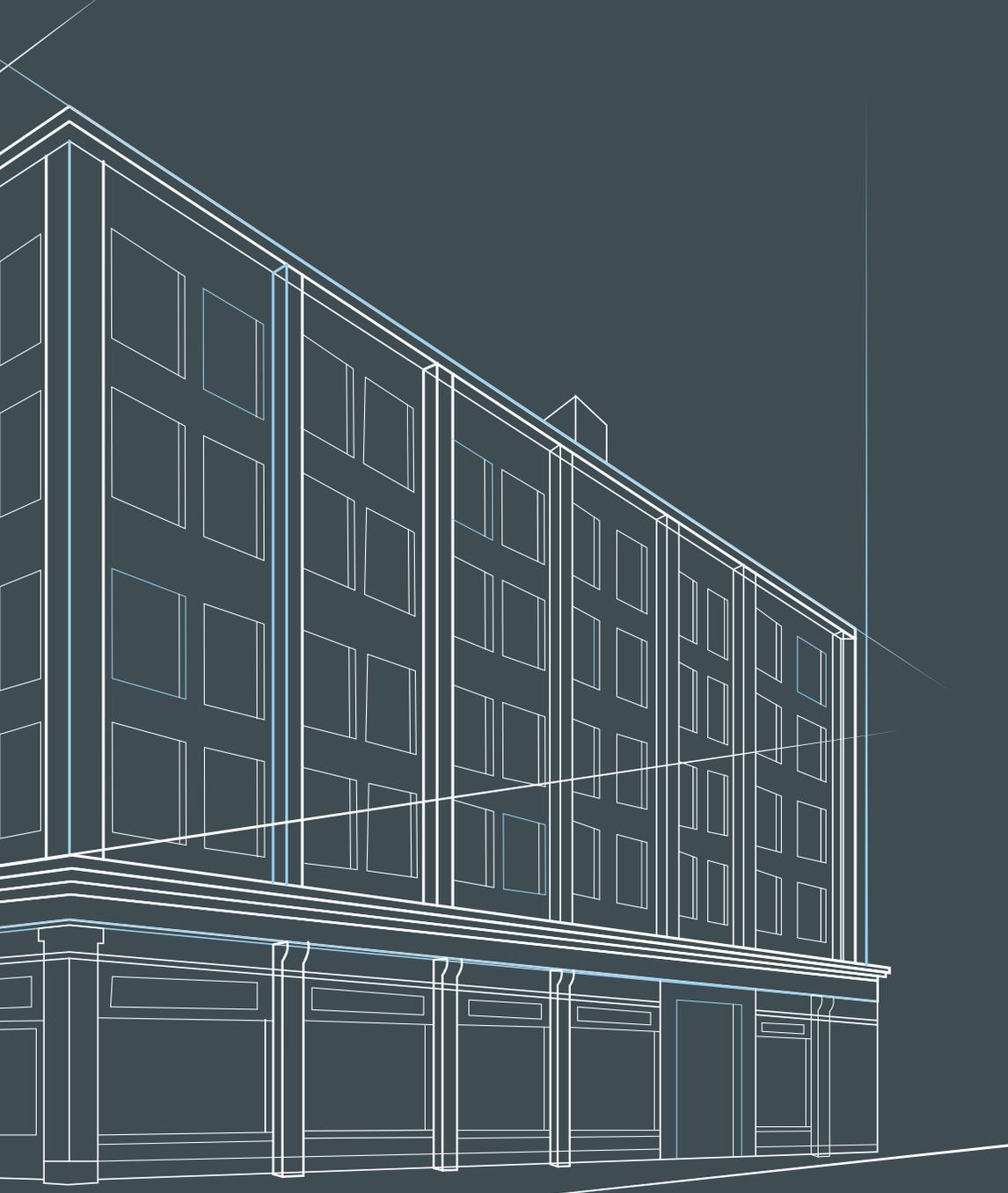
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan hasil **reviu** dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





34

# INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

# LAYANAN KEUANGAN



“Keuangan adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan keuangan** yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang **dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi** yang **memberikan nilai manfaat** dalam **Pengelolaan Keuangan IPPD**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD

<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan keuangan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan</u></li><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk <b>panduan</b> penggunaan <b>aplikasi</b>)</li><li>- Bukti optimalisasi</li></ul>
----------------------	--

## REFERENSI LAYANAN KEUANGAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



# INDIKATOR 34

## Layanan Keuangan

(2/2)

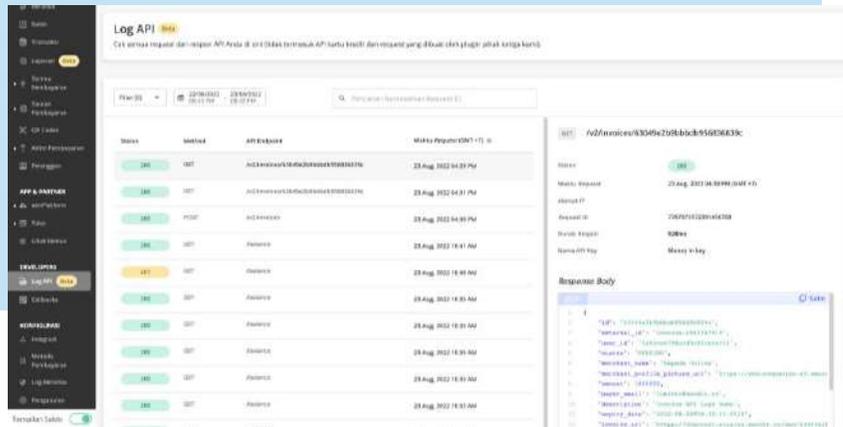


### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan keuangan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya



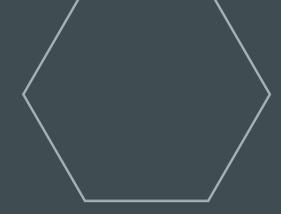
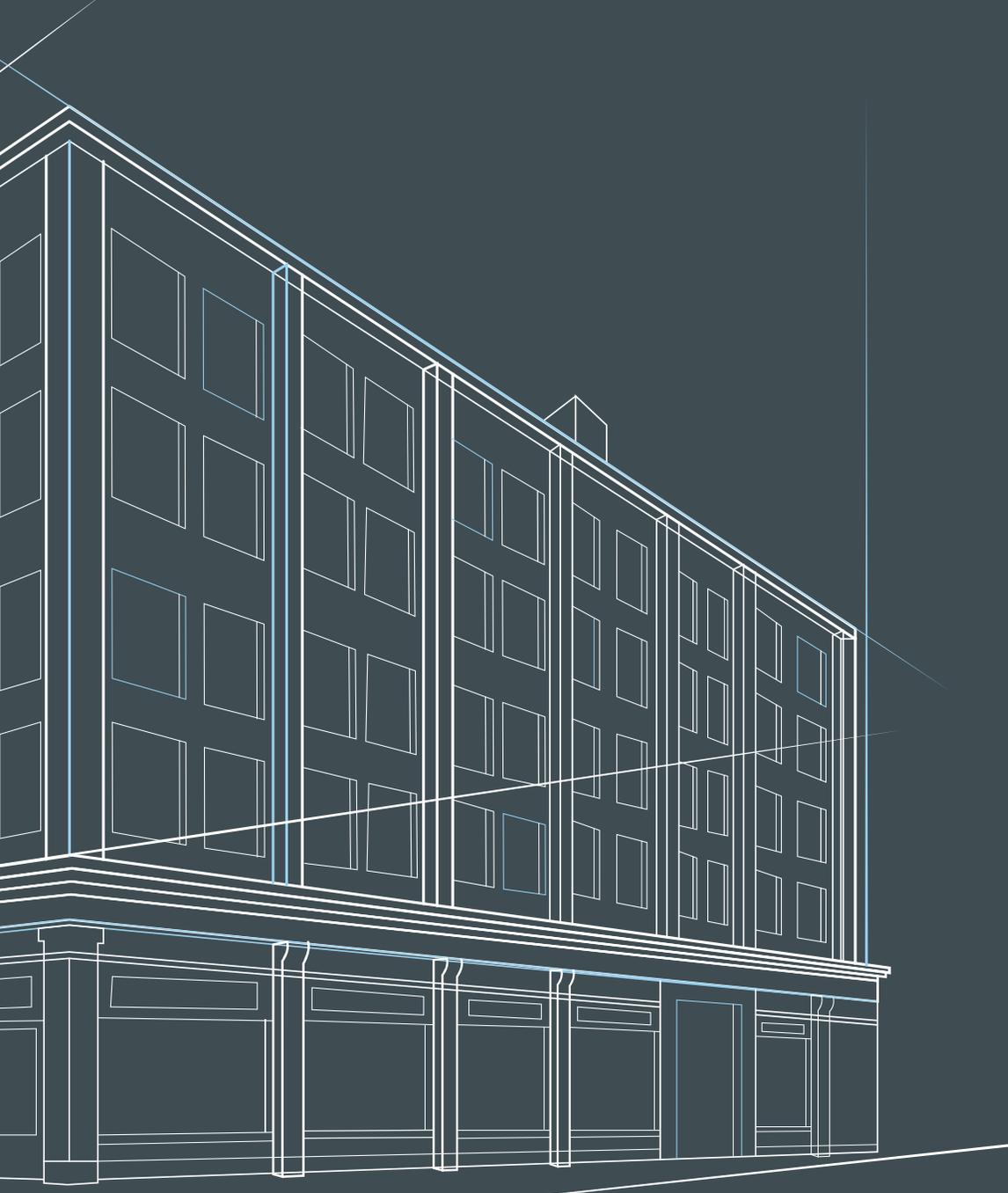
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





**35**

# INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa



# LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

“Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian **proses** untuk menghasilkan **pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD.**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD
- Meningkatkan **optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas** melalui keterpaduan proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

## Ruang Lingkup

- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis serta **optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan**
  - Dokumentasi **pemanfaatan sistem aplikasi**
  - **Penjelasan** mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)
  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
  - **Bukti optimalisasi**
- **Evaluasi/reviu** berisi konten **isu/permasalahan** dan **rekomendasi** perbaikan yang aktual.
- **Bukti Undangan** evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam **melaksanakan Layanan** Pengadaan Barang dan Jasa secara **berkesinambungan, wajib menggunakan SPSE** yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum serta **diharapkan memiliki Implementasi Katalog Lokal/Sektoral dengan Indeks  $\geq 80\%$**

## • • • REFERENSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA • • •

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 1148/2021 - Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 35

## Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Pengadaan Barang/Jasa pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan, mengunggah dan mengunduh e-dokumen** terkait laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

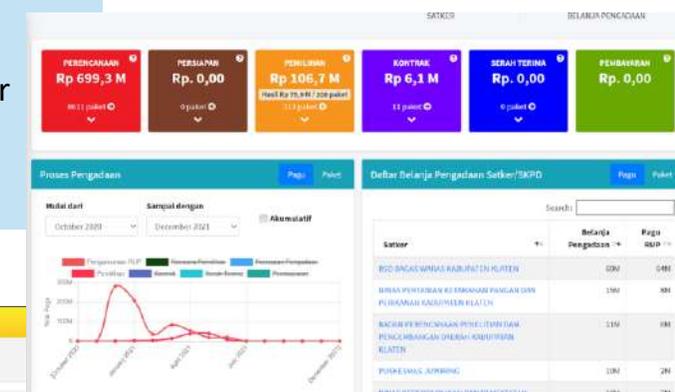
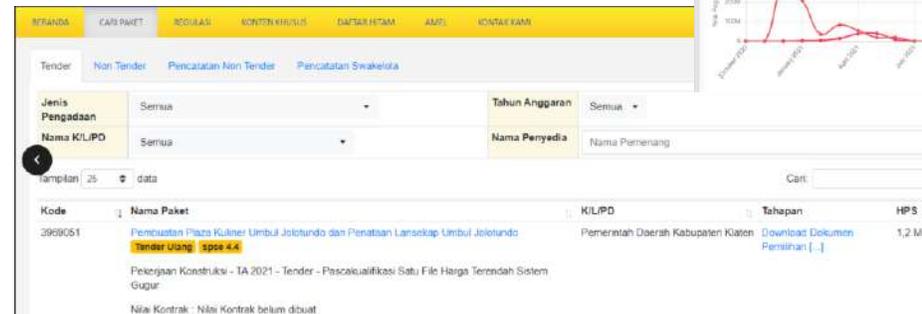
- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen pengadaan barang dan jasa

### Level 3

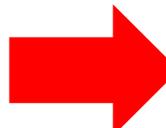
IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi Pengadaan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan **mekanisme persetujuan** dan **validasi** dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk **bertransaksi**, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data**, dan atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 35

## Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

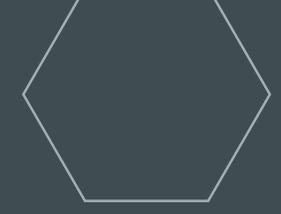
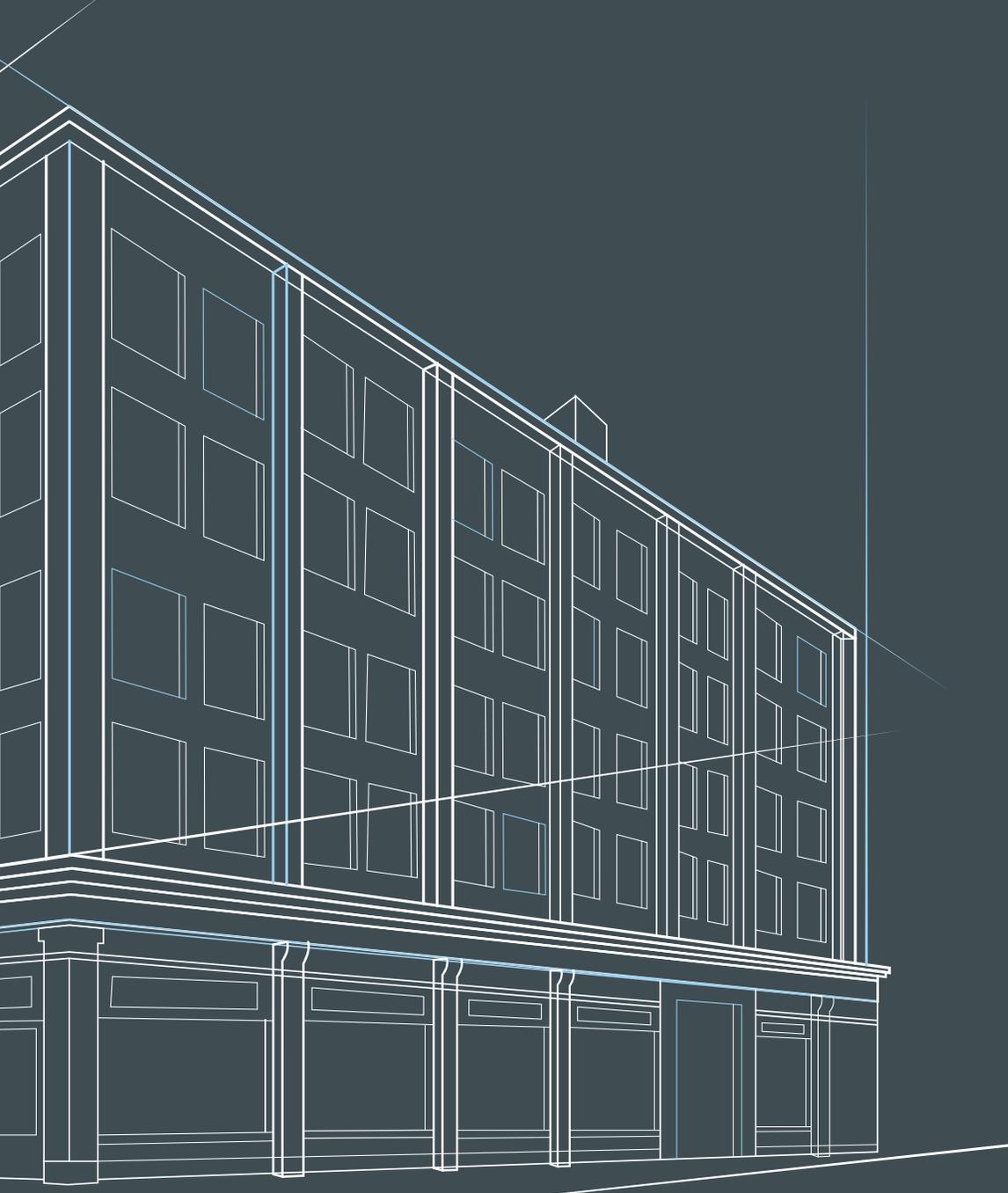
Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa **optimalisasi** kebijakan **layanan, tata Kelola** layanan, maupun **manajemen** layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 secara otomatis apabila sudah menggunakan aplikasi SPSE dan memiliki **Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral  $\geq 80\%$**

10 Kabupaten dengan Indeks Implementasi Percepatan Katalog Lokal (Indeks Komposit) **Terbesar**

NO.	PEMERINTAH KABUPATEN	INDEKS KOMPOSIT
1	KAB BANYUWANGI	83,47%
2	KAB JOMBANG	58,72%
3	KAB MANTUAHA UTARA	58,71%
4	KAB GRESIK	48,47%
5	KAB GOWA	42,80%
6	KAB NGAWI	32,57%
7	KAB SIDOARJO	30,98%
8	KAB LAMPUNG SELATAN	29,02%
9	KAB LAMPUNG TENGAH	28,60%
10	KAB KULON PROGO	28,01%





**36**

**INDIKATOR 36**

**Layanan Kepegawaian**



# LAYANAN KEPEGAWAIAN



“Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kepegawaian IPPD.”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
- Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen ASN

<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan</u> berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
----------------------	---

## REFERENSI LAYANAN KEPEGAWAIAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 36

## Layanan Kepegawaian

(1/2)



### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengajuan pangkat dll

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Kepegawaian pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** e-dokumen terkait Pengelolaan Kepegawaian seperti Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

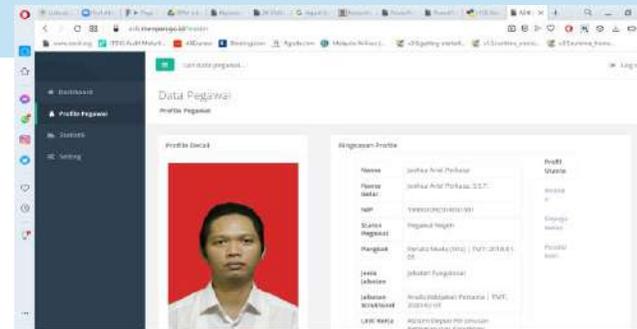
- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen administrasi kepegawaian

### Level 3

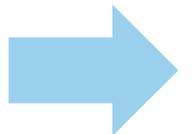
IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Kepegawaian dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 36

## Layanan Kepegawaian

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, kearsipan dan/atau dengan layanan kepegawaian Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan **dokumentasi integrasi layanan** SPBE lainnya



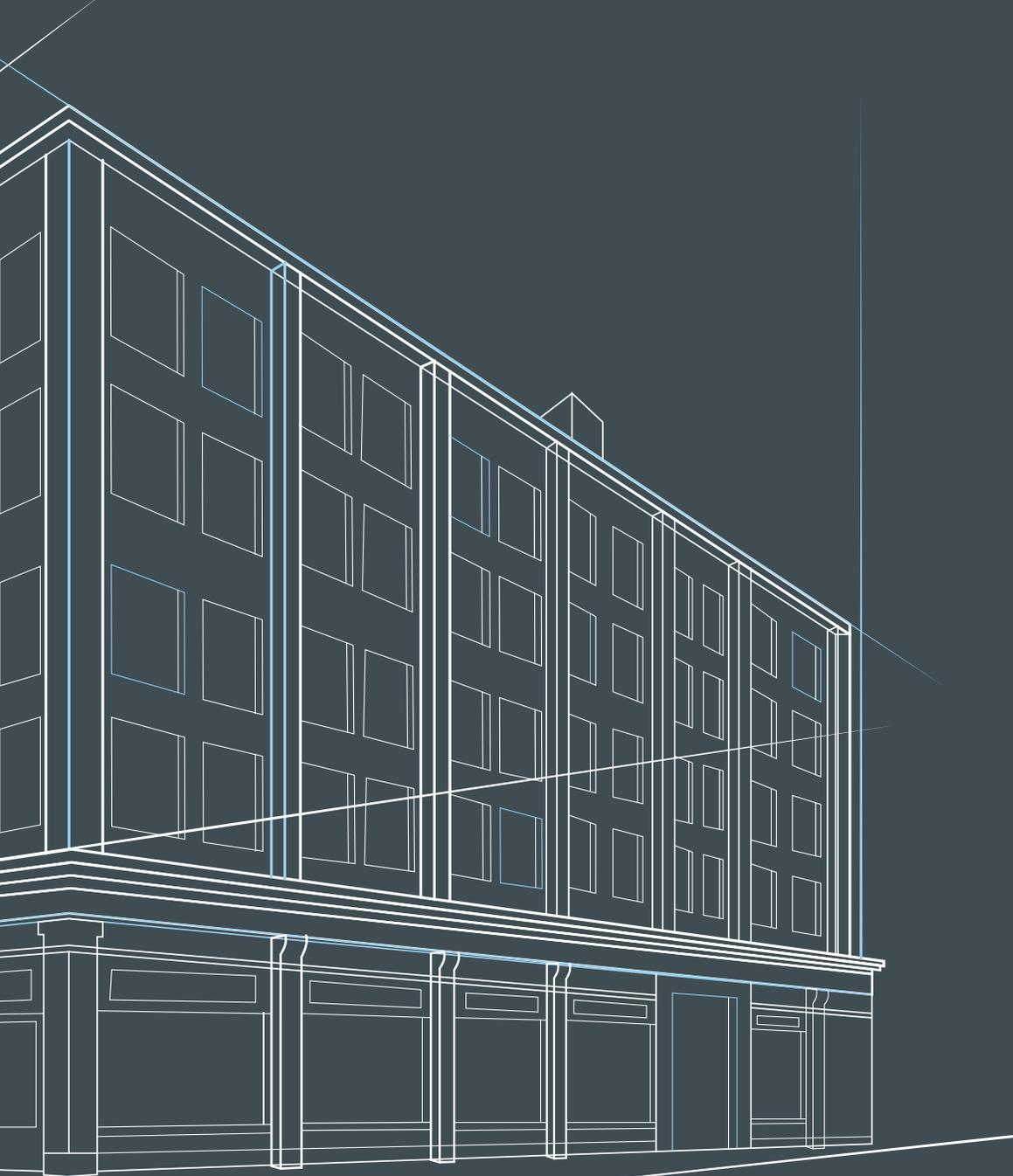
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan /dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi **kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan**
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





37

# INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan Dinamis



# LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS



“Kearsipan adalah **serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan IPPD**.”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu

## Ruang Lingkup

- Arsip terbagi menjadi:
  - **Arsip dinamis** yang merupakan dokumen/naskah dinas yang masih digunakan
  - **Arsip statis** yang merupakan dokumen/naskah dinas yang telah melewati masa retensinya
- Layanan Kearsipan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan **kapabilitas fungsi teknis** serta **optimalisasi penguatan kebijakan** layanan, **perbaikan tata kelola** layanan, dan **penerapan manajemen dari layanan**
- Dokumentasi **pemanfaatan sistem aplikasi**
- **Penjelasan** mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)
- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
- **Bukti optimalisasi**
- IPPD dalam melaksanakan Layanan Kearsipan Dinamis, **wajib menggunakan SRIKANDI** yang telah **ditetapkan sebagai Aplikasi Umum**

## REFERENSI LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

.....

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 679/2020 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 37

## Layanan Kearsipan Dinamis

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik arsip

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Kearsipan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** e-dokumen terkait pengelolaan arsip seperti naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:

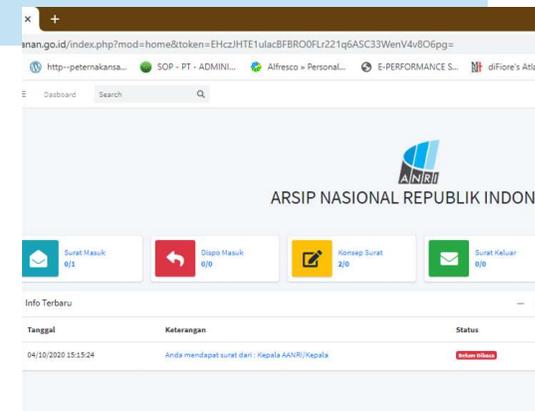
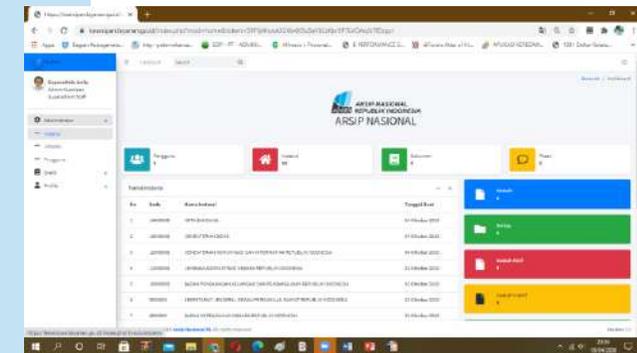
- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen terkait kearsipan

### Level 3

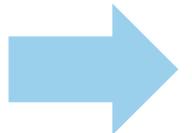
IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Pengelolaan Kearsipan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 37

## Layanan Kearsipan Dinamis

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya**, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya



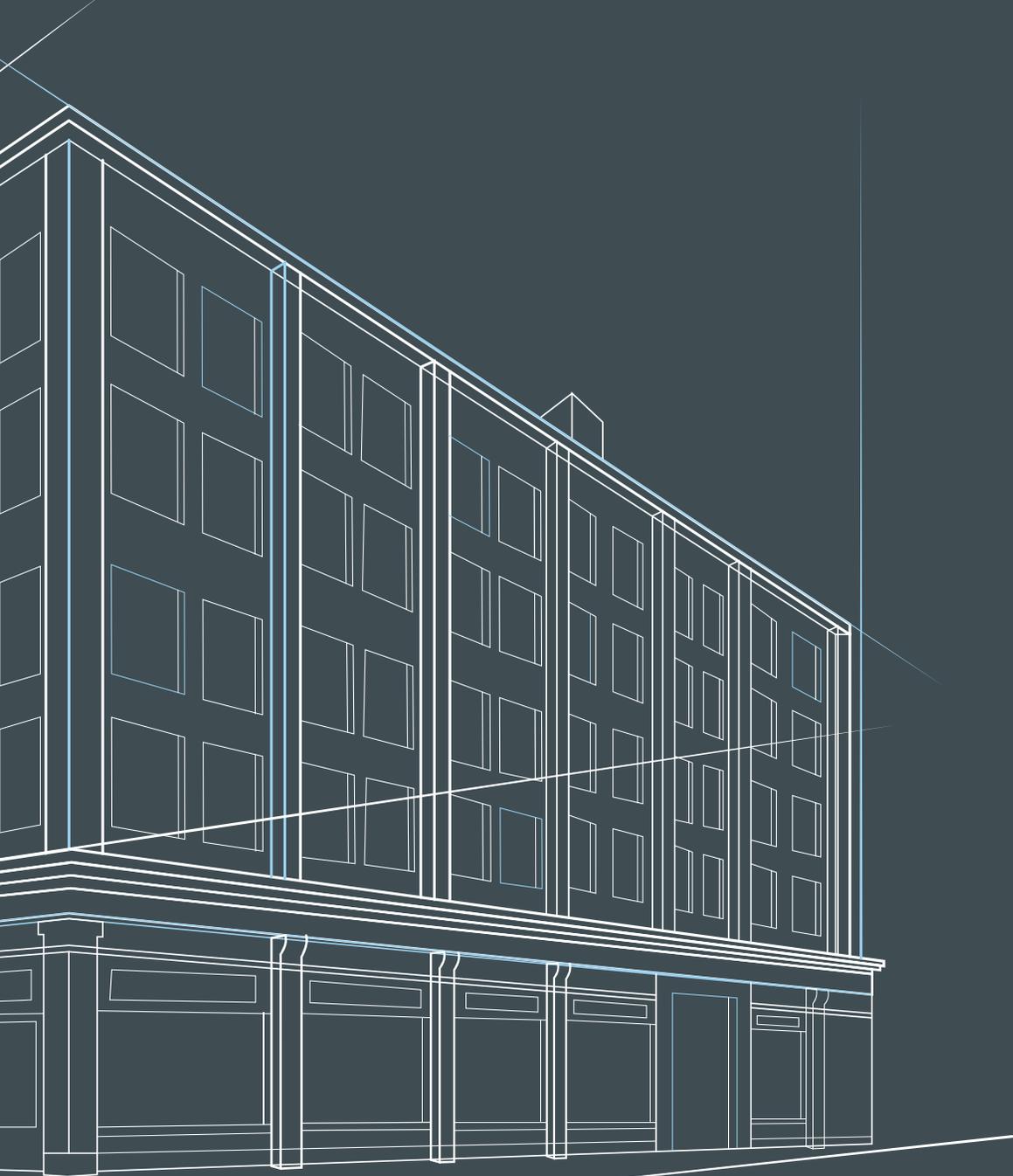
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa **optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan**
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut** pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





# 38

## INDIKATOR 38

Layanan Pengelolaan  
Barang Milik Negara/Daerah



# LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) adalah serangkaian **proses untuk menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel**. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah.**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan</u></li><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul>
-----------------------------	---

## REFERENSI LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 38

## LAYANAN PENGELOLAAN BMN/D

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** barang milik Negara/Daerah pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mungunduh e-dokumen** terkait Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi ruangan

Kriteria Bukti Dukung:

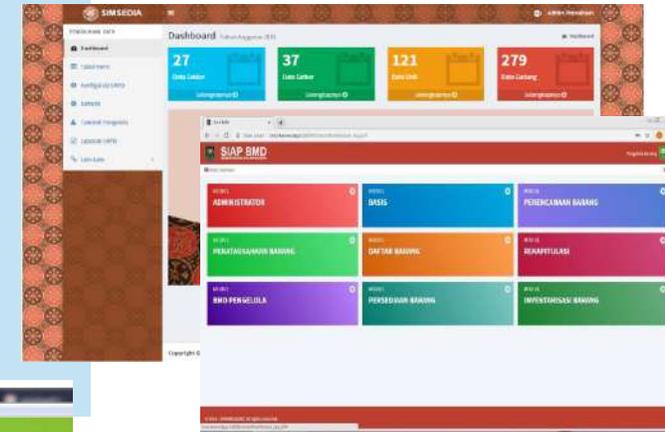
- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen inventarisasi barang milik Negara/Daerah

### Level 3

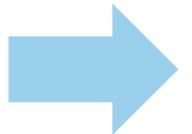
IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi Pengelolaan BMN/BMD dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan **mekanisme persetujuan** dan **validasi penghapusan** BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data**, dan atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 38

## LAYANAN PENGELOLAAN BMN/D

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya



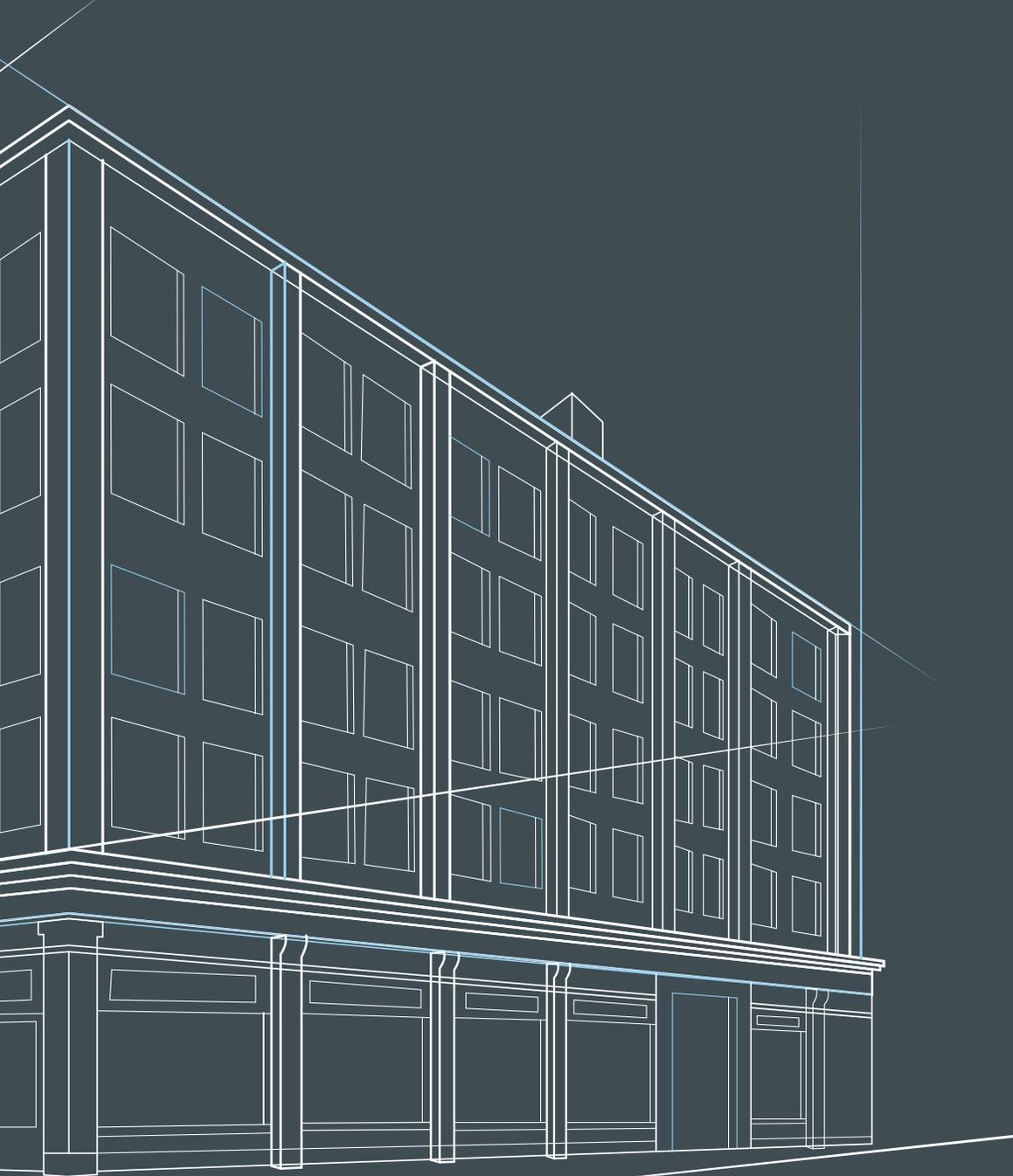
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa **optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan**
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





# 39

## INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

# LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL



“Pengawasan internal adalah serangkaian **proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel**. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan **nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD.**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Pengawasan Internal berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

## REFERENSI LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 39

## Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengawasan Internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** pengawasan internal pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mungunduh e-dokumen** terkait pengelolaan pengawasan seperti dokumen hasil pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur **pencarian, upload** dan atau **Download** dokumen pengawasan internal

### Level 3

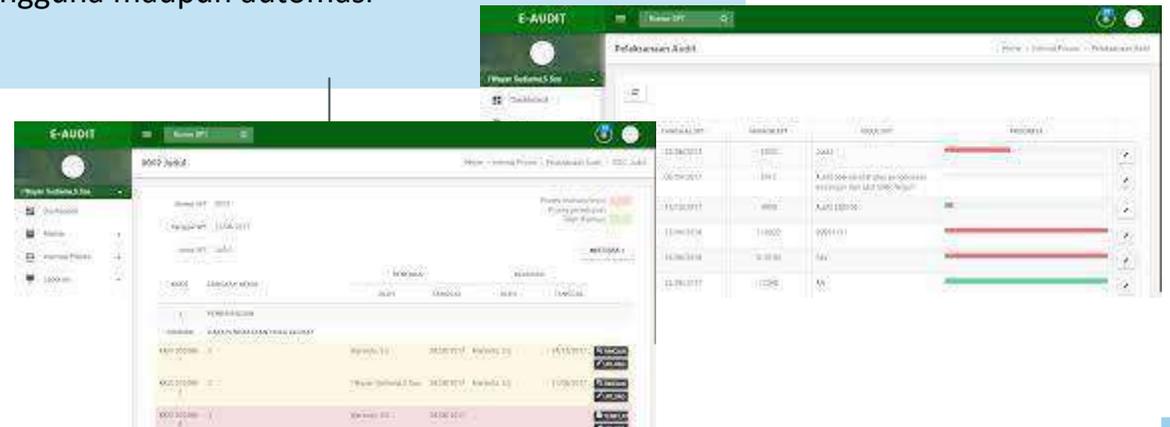
IPPD sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data pengawasan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme **persetujuan** dan **validasi** penghapusan

Kriteria Bukti Dukung:

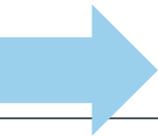
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data**, dan atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Gratifikasi Online



Level 4-5



# INDIKATOR 39

## Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti keuangan, kepegawaian, perencanaan dan sistem lainnya.

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya**, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi layanan** SPBE lainnya

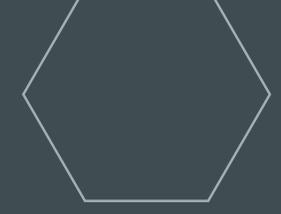
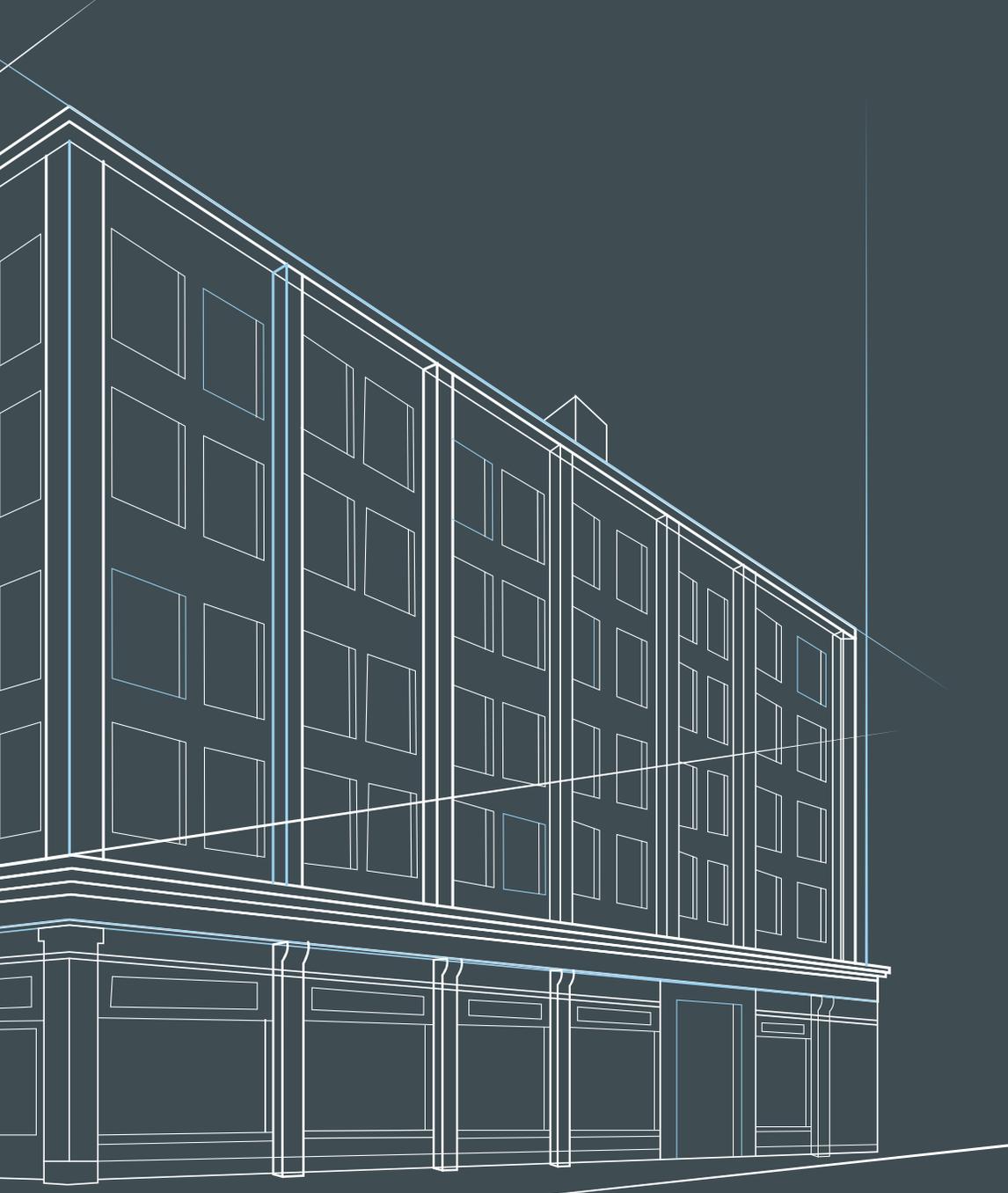
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





# 40

## INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas  
Kinerja Organisasi



# LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI



“Akuntabilitas Kinerja IPPD adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD ”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

## REFERENSI LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 40

## Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Akuntabilitas Kinerja pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **transaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** informasi akuntabilitas kinerja

Kriteria Bukti Dukung:

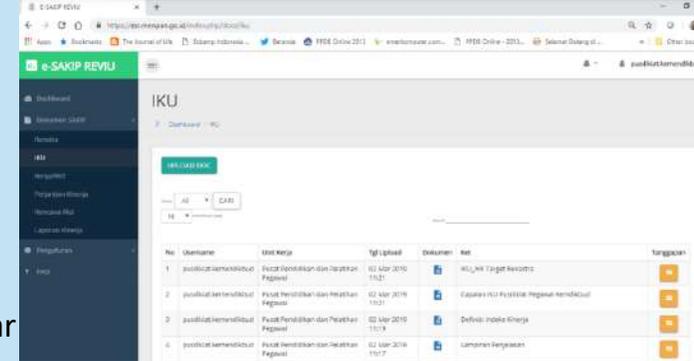
- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, **upload** dan atau **Download** pelaporan pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

### Level 3

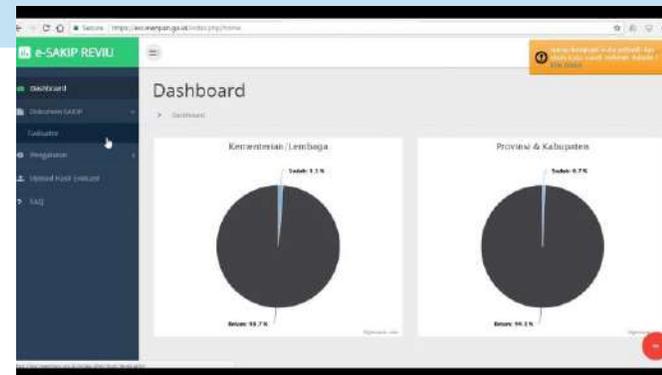
IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Akuntabilitas kinerja Organisasi, dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi**

Kriteria Bukti Dukung:

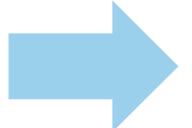
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data**, dan atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



No	Uraian	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	ket	terapkan
1	puisikalskemendikbud	Unit Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	02 Apr 2019 15:21	5	WU_M Target Kinerja	
2	puisikalskemendikbud	Unit Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	02 Apr 2019 15:21	5	Kalender IKU Pustakal Perguruan Rendah	
3	puisikalskemendikbud	Unit Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	02 Apr 2019 15:19	5	Definisi Indeks Kinerja	
4	puisikalskemendikbud	Unit Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	02 Apr 2019 15:17	5	Lampiran Bergejala	



Level 4-5



# INDIKATOR 40

## Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(2/2)

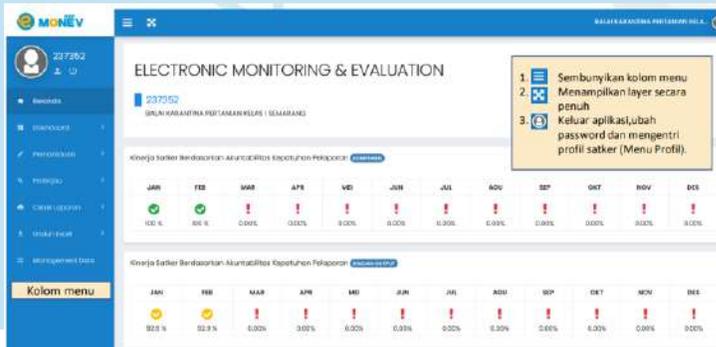


### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada **Arsitektur aplikasinya**, pengelolaan repositori **API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya



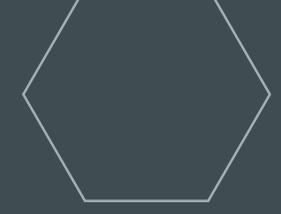
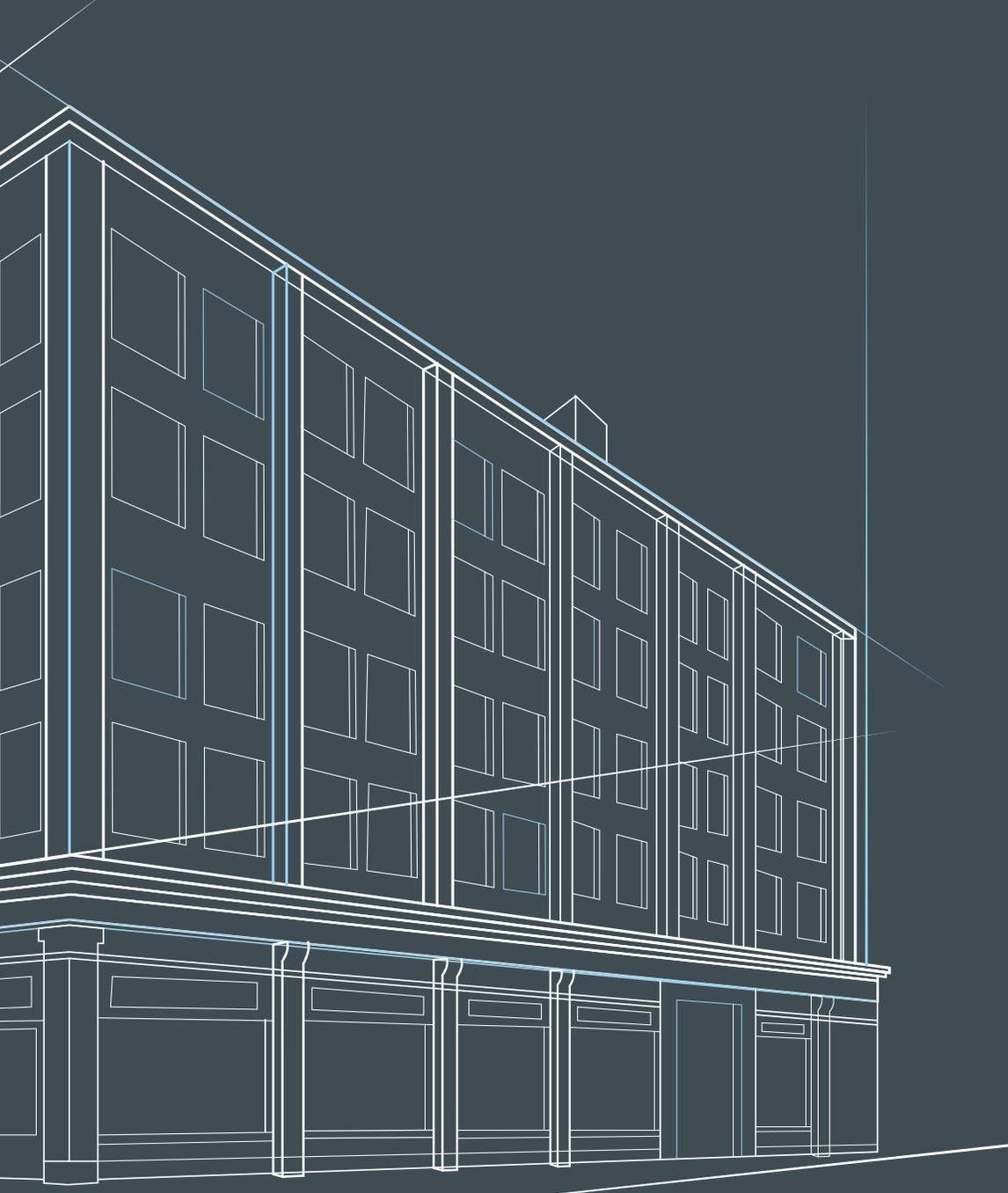
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE





# 41

## INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai

# LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI

“Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk **menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel**. Layanan Kinerja Pegawai IPPD berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 atau lebih aplikasi yang **memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan</u> berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

## REFERENSI LAYANAN KINERJA PEGAWAI

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 41

## Layanan Kinerja Pegawai

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau penilaian kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kinerja pegawai pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti **mencari informasi** dan **mengunduh e-dokumen** terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, **upload** dan atau **Download** pelaporan pada Layanan Kinerja Pegawai

### Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon pengguna dengan **mekanisme persetujuan** dan **validasi hasil kinerja pegawai**

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya **upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 41

## Layanan Kinerja Pegawai

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Kinerja pegawai IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya



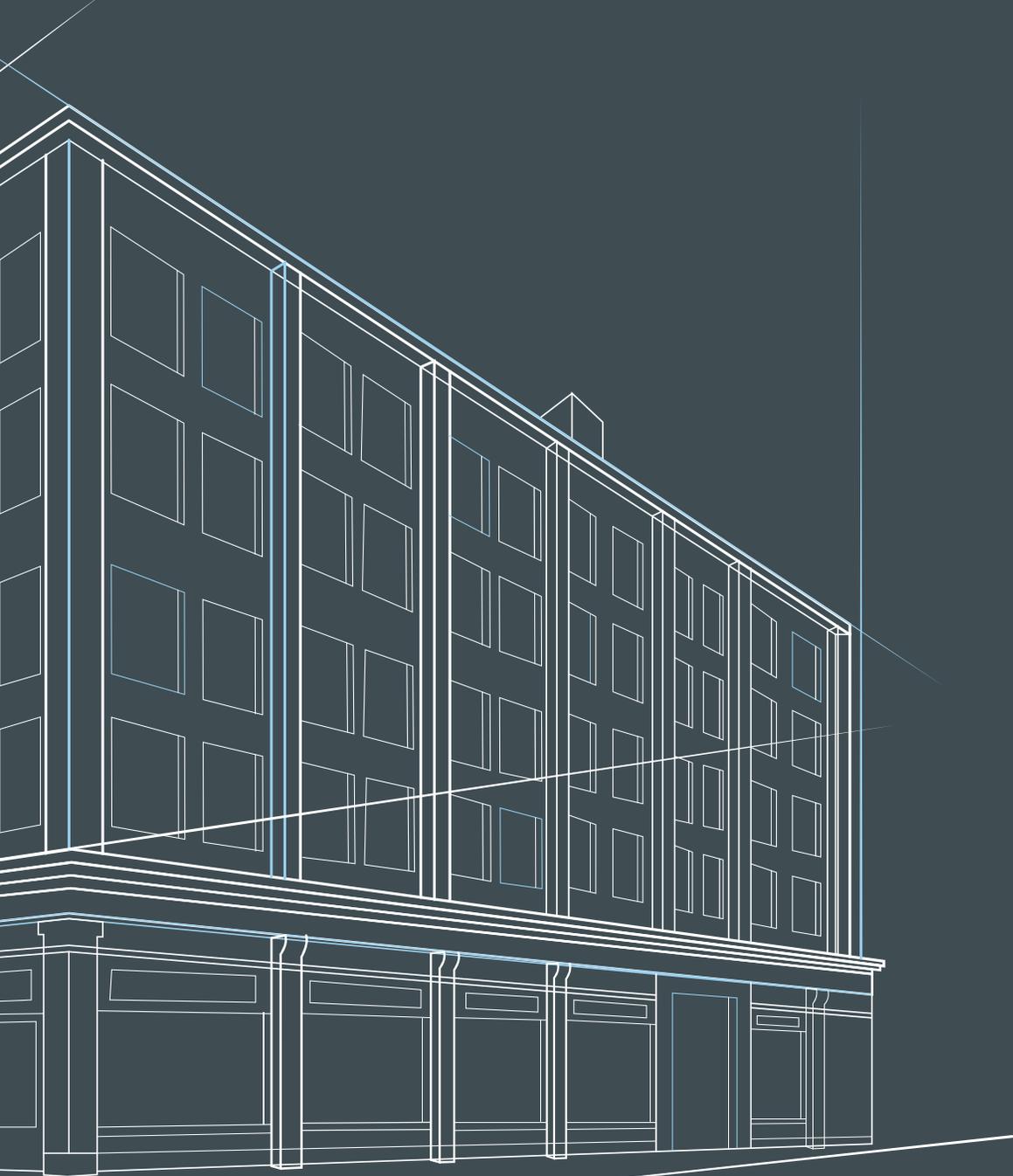
### Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat notulensi **dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE** untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE





# 42

## INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan  
Pelayanan Publik



# LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



“Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan **pengaduan pelayanan publik** IPPD yang **efektif, efisien** dan **akuntabel**.”

## TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik

<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis</u> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li><li>• Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, <b>wajib menggunakan LAPOR-SP4N</b> yang telah <b>ditetapkan</b> sebagai <b>Aplikasi Umum</b></li></ul>
----------------------	---

## REFERENSI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 680/2020 Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 42

## Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengaduan Pelayanan Publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan **mengunduh e-dokumen** terkait pengaduan pelayanan publik seperti Daftar Pengaduan Pelayanan Publik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh **sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna**, seperti ada **fitur pencarian, upload dan atau Download** pelaporan pada Layanan Pengaduan Publik

### Level 3

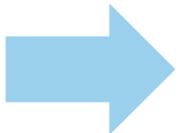
IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi Pengaduan Pelayanan Publik, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki **fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 42

## Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan layanan Pengaduan Pelayanan Publik IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya



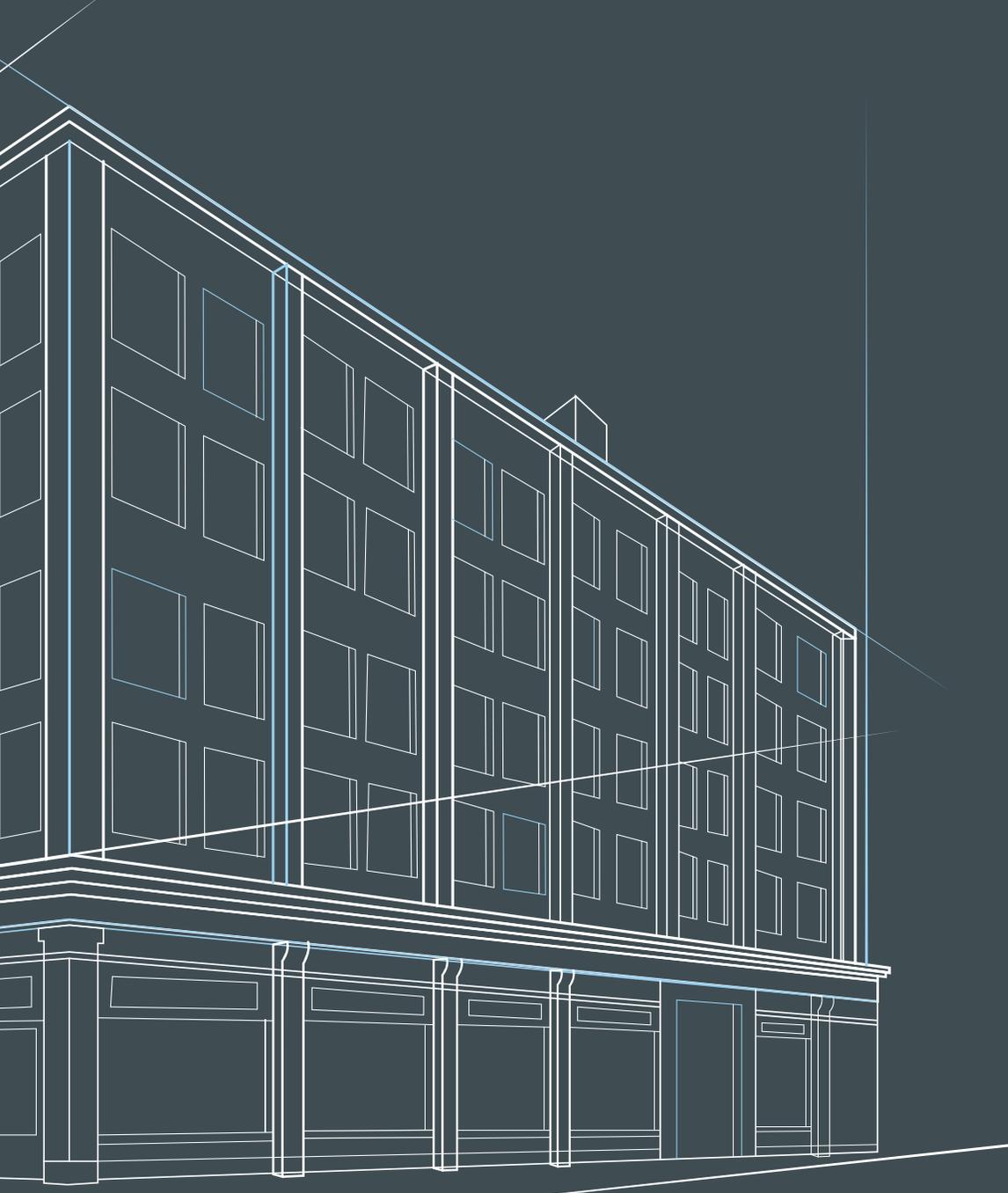
### Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE





43

# INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

# LAYANAN DATA TERBUKA



“Layanan Data Terbuka (Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Data terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh IPPD yang dapat dibagi pakai oleh IPPD lain.”

## TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan</u> berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

## REFERENSI LAYANAN DATA TERBUKA

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 43

## Layanan Data Terbuka

(1/2)

### Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik penggunaan data terbuka

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Data Terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventaris data yang dibagi pakai

Kriteria Bukti Dukung:

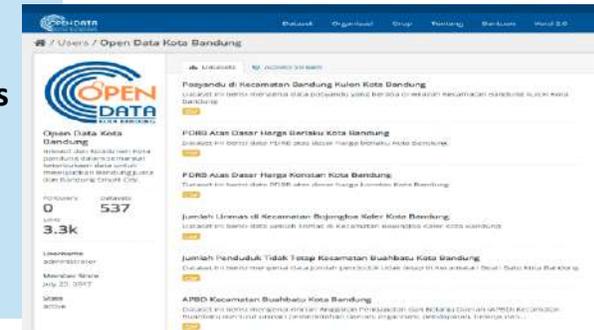
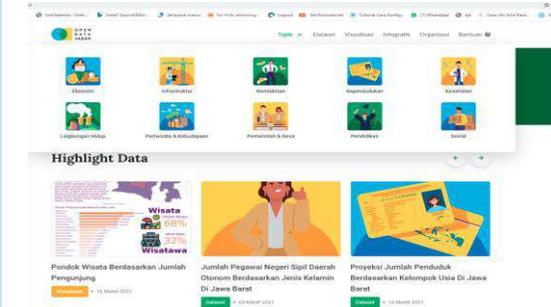
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download data terbuka**

### Level 3

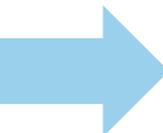
IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan **mekanisme persetujuan dan validasi data terbuka.**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 43

## Layanan Data Terbuka

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan Layanan Data Terbuka IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya



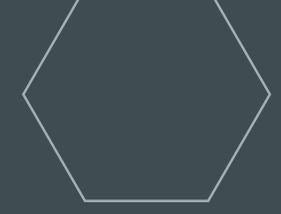
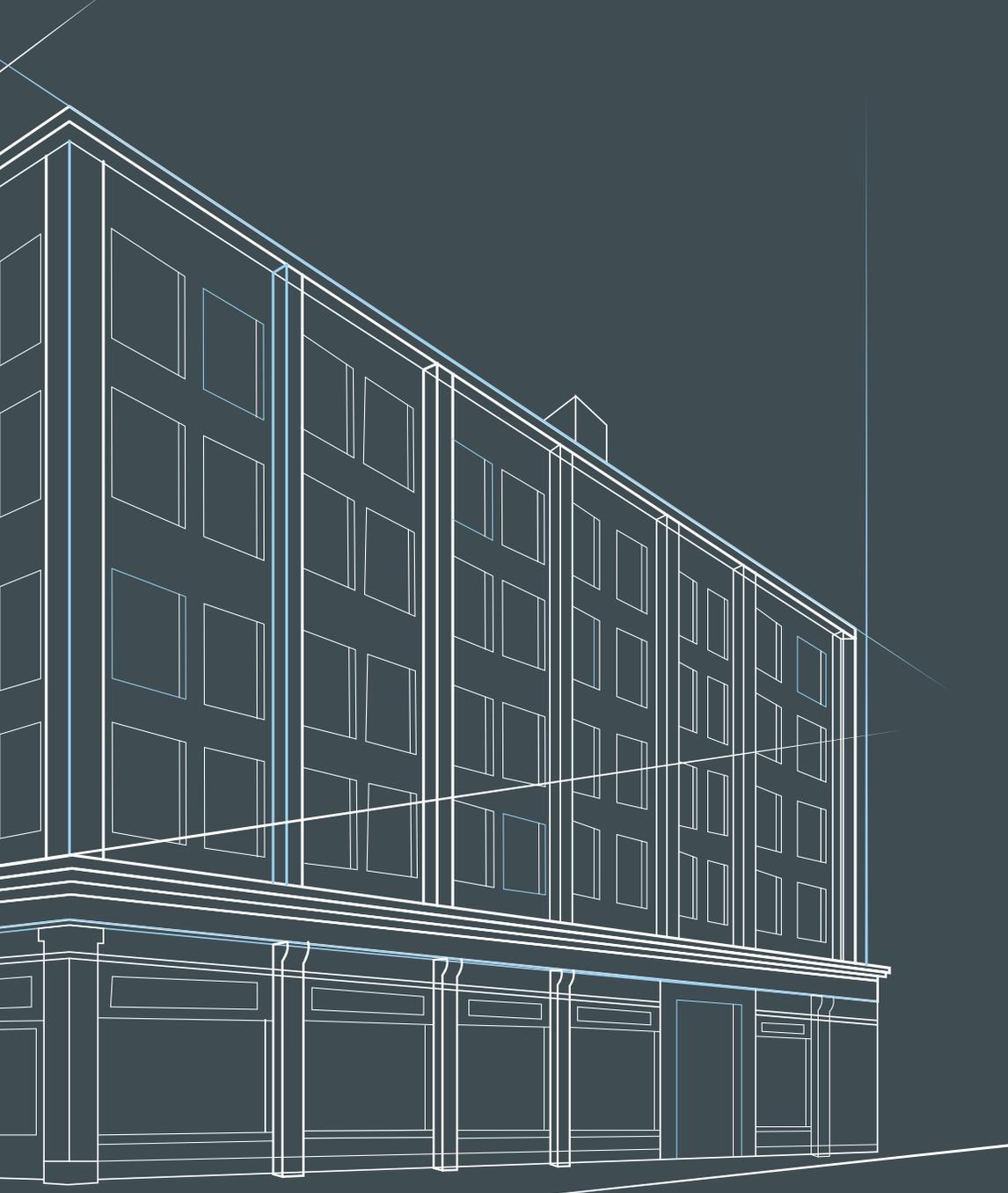
### Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu** dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE





**44**

# INDIKATOR 44

Layanan Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi  
Hukum (JDIH)



# LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah **serangkaian proses** untuk **menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan</u> berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

## REFERENSI LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 44

## Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(1/2)

### Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik dokumentasi dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti dokumentasi dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload dan atau Download** produk hukum

### Level 3

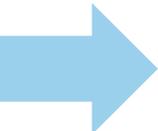
IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan **mekanisme persetujuan** dan **validasi dokumentasi** dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi **transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data**, dan atau **analitik data** baik antar pengguna maupun automasi



Level 4-5



# INDIKATOR 44

## Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti kearsipan, perpustakaan dan/atau dengan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan **repositori API**, dan **dokumentasi integrasi** layanan SPBE lainnya



Anggota	Website JDIH	Status Integrasi
Kementerian Agama RI	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kawasan Perkotaan, Pedesaan dan Pembangunan (ATR/BPN)	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa)	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	http://id.kemendagri.go.id	Pilot JDIH
Kementerian Kesehatan dan Keluarga (KEMKES)	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Kewilayatan RI	http://id.kemendagri.go.id	Sudah
Kementerian Koordinator RI	http://id.kemendagri.go.id	Sudah

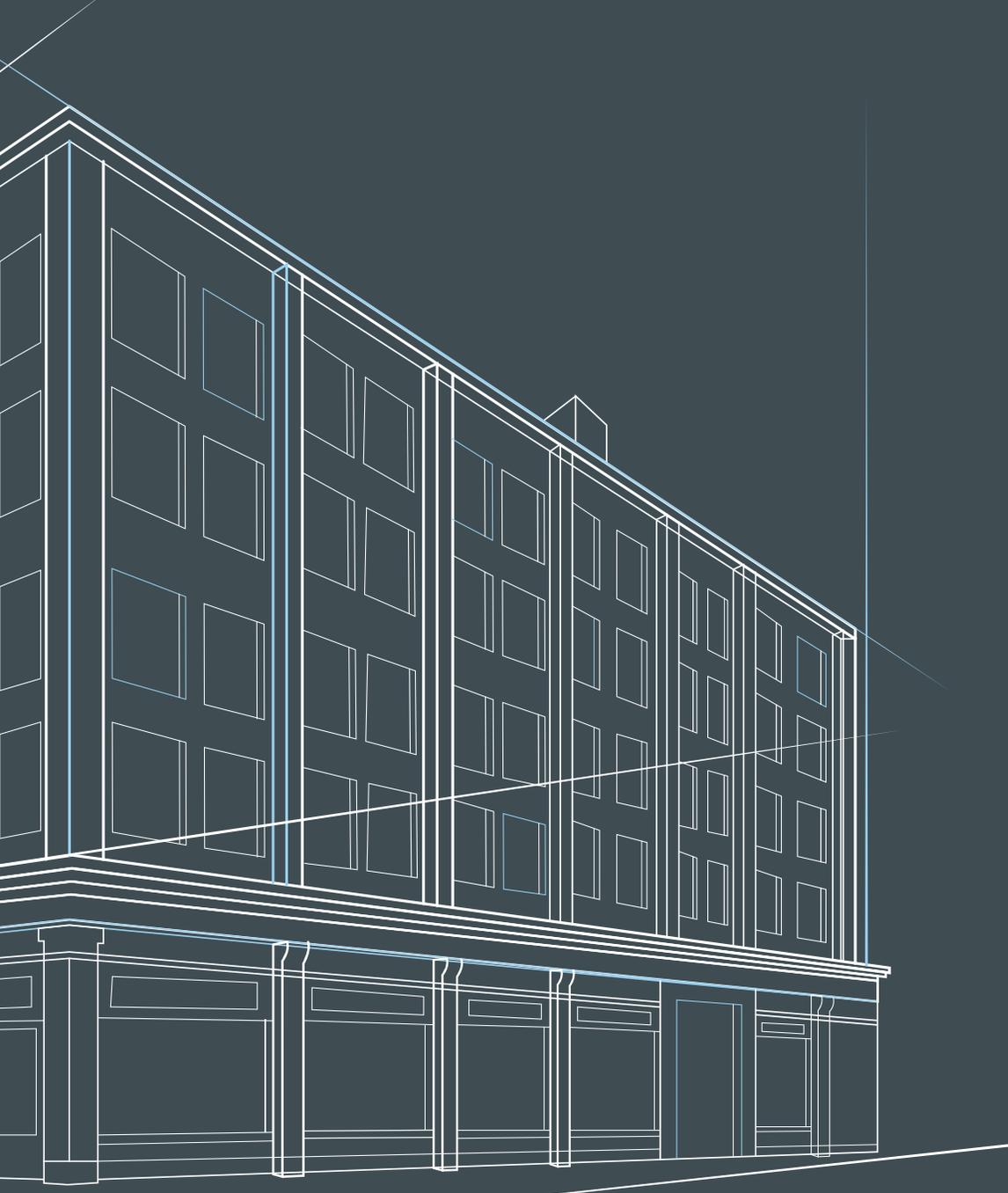
### Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE





# 45-47

## INDIKATOR

Layanan Publik Sektoral 1 – Sektoral 3

# LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1,2 & 3



“Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan **pengelolaan tugas** dan **fungsi sektoral** IPPD yang **efektif, efisien dan akuntabel.**”

## TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE baik **G2C maupun G2B**
-



# PERUBAHAN PENILAIAN PADA DOMAIN LAYANAN (INDIKATOR 35, 45, 46, 47)



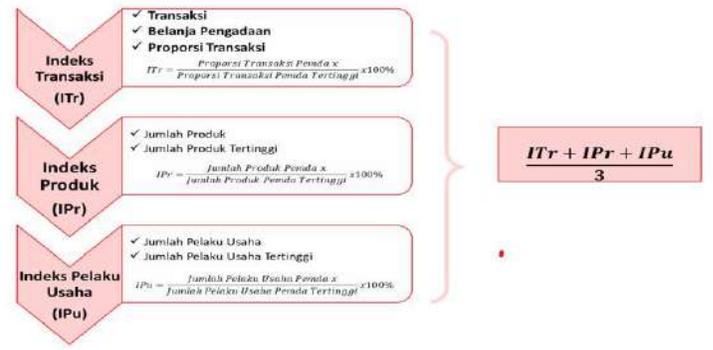
## Domain Layanan SPBE (Indikator 32 – 47)

**Bobot  
45,5%**

**Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**  
(bobot per layanan : 2,75% (total 27,5%))

1. Layanan Perencanaan
2. Layanan Penganggaran
3. Layanan Keuangan
4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Layanan Kepegawaian
6. Layanan Kearsipan
7. Layanan Pengelolaan BMN/BMD
8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
9. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10. Layanan Kinerja Pegawai

Menggunakan referensi penilaian dari LKPP dengan kriteria yaitu:  
**Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral (Komposit)**



Kriteria: Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral di atas 80% akan mendapatkan tingkat kematangan SPBE nilai 5

**Layanan Publik Berbasis Elektronik**  
(bobot per layanan: 3% (total 18%))

1. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Layanan Data Terbuka
3. Layanan JDIH
4. Layanan Publik Sektor 1
5. Layanan Publik Sektor 2
6. Layanan Publik Sektor 3

1. Mengakomodir penerapan layanan **RB Tematik**:
  - Layanan yang mendukung pengentasan kemiskinan
  - Layanan yang mendukung peningkatan investasi
  - Layanan yang mendukung prioritas aktual Presiden (inflasi, pengadaan barang/jasa, stunting, dll)
2. Mengakomodir penerapan **MPP Digital**

**Kriteria:** IPPD yang sudah menggunakan layanan yang mendukung penerapan RB Tematik akan mendapatkan tingkat kematangan 5, serta menerapkan MPP Digital akan mendapatkan level 4 dan atau 5 (perlu dipastikan tingkat kematangan berjenjang)

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan <b>layanan sektoral selain pada indikator 32-44</b></li><li>• Yang <b>dimaksud layanan publik sektoral</b> pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat <i>Government to Citizen (G to C)</i>, <i>Government to Business (G to B)</i>, maupun <i>Government to Government (G to G)</i> sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</li><li>- Layanan Publik Sektoral 1 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan <u>didokumentasikan berdasarkan <b>kapabilitas fungsi teknis</b> serta <b>optimalisasi penguatan kebijakan</b> layanan, <b>perbaikan tata kelola</b> layanan, dan <b>penerapan manajemen dari</b> layanan</u><ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi <b>pemanfaatan sistem aplikasi</b></li><li>- <b>Penjelasan</b> mengenai pemanfaatan sistem aplikasi (direkam dalam bentuk video penjelasan, atau tangkapan layar yang dinarasikan sesuai dengan tingkat kematangan yang diklaim)</li><li>- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)</li><li>- <b>Bukti optimalisasi</b></li></ul></li></ul>
----------------------	---

## • • • • • REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1,2,3 • • • • •

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# INDIKATOR 45,46,47

## Layanan Publik Sektoral 1,2,3

(1/2)

### Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

### Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur **pencaharian, upload** dan **atau Download**

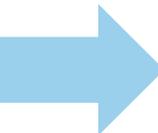
### Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi terkait Layanan Publik Sektor**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval data, dan atau analitik data** baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5



# INDIKATOR 45,46,47

## Layanan Publik Sektoral 1,2,3

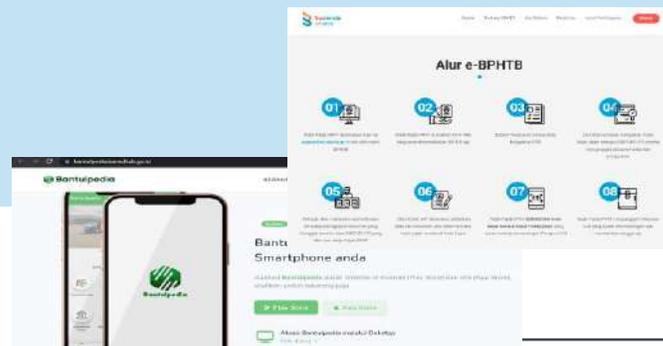
(2/2)

### Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan Publik Sektor IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan/middleware/ basis data** seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 4 secara langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang **apabila telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital**

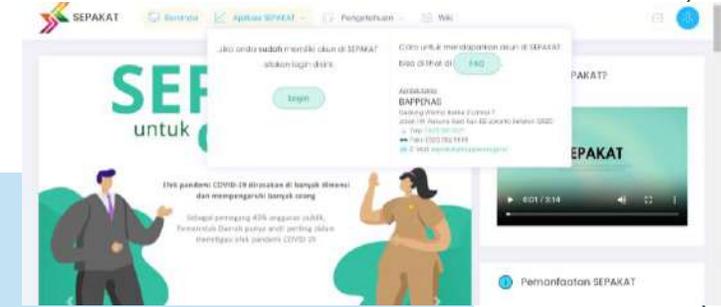


### Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi **dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Terdapat notulensi dan hasil rewiu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 apabila sudah **menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dll) dan atau menerapkan MPP Digital yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan atau pemanfaatan layanan hingga 80% dari pengguna**



## BAGAIMANA DENGAN LAYANAN PUBLIK SEBELUMNYA?

- ✓ Indikator 45-47, IPPD masih dapat menyampaikan layanan unggulannya selain dari layanan RB Tematik maupun MPP Digital, sifatnya perlu dibuktikan pemanfaatannya secara **berjenjang** setiap level kematangan.
- ✓ Selain ditingkatkan kapasitas teknis, sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan **layanannya**, dan/atau dengan melakukan **optimalisasi** melalui penguatan **kebijakan** layanan, perbaikan **tata kelola** layanan, dan penerapan **manajemen** dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung
- ✓ Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.**

# Do and Don't Evaluasi Internal dan Penyiapan Data Dukung Domain Layanan

## Do



1. Membuktikan pemanfaatan, bukan sekedar pengadministrasian sesuai tingkat kematangan
2. Berjenjang, dan dinarasikan secara urut sesuai dengan pedoman MenpanRB 6, 2023 (Point B.4, halaman 184)
3. Persiapkan akses 16 layanan yang masuk domain layanan untuk bisa dibuktikan pemanfaatannya (menghadapi interview)
4. Memastikan adanya aktivitas untuk pemeliharaan dan pengembangan 16 layanan yang ada di domain layanan masuk pada Peta Rencana SPBE.
5. Merepositorikan bukti dukung, video, narasi, dokumentasi, notulensi, undangan pada lokasi yang terpusat dan mudah diakses.
6. Memanfaatkan SPLP internal untuk membangun integrasi horizontal dan vertical.

## Don't



1. Hanya menyertakan halaman login/home aplikasi
2. Menyertakan bukti dukung pemanfaatan dengan menggunakan Buku Pedoman manual user, tanpa penjelasan klaim tingkat kematangan.
3. Menyertakan bukti dukung video yang tidak sesuai (tanpa menjelaskan tingkat kematangan per level)
4. Klaim tingkat optimum tanpa disertakan bukti before and after dan dipointing dengan jelas.
5. Mengesampingkan maturitas system informasi (terutama layanan public) dengan hanya berorientasi pada outcome layanan elektronik.
6. Menyertakan bukti dukung yang tidak searchable.



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA  
KASIH**